

**PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* DAN
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*
PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Disusun Oleh:

**DESSY SAPTARINI
NIM. 15.51.2.1.106**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2020**

PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SKRIPSI

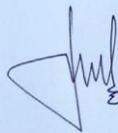
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:

DESSY SAPTARINI
NIM. 15.51.2.1.106

Surakarta, 16 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Ade Setiawan, M.Ak
NIP. 19800712 201403 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DESSY SAPTARINI
NIM : 15.51.2.1.106
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 16 Oktober 2020



Dessy Saptarini

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DESSY SAPTARINI
NIM : 15.51.2.1.106
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA”

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan mengambil data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Badan Layanan Pengadaan (BLP). Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 16 Oktober 2020



Dessy Saptarini

Ade Setiawan, M.Ak
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Dessy Saptarini

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah ,emelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dessy Saptarini NIM: 15.51.2.1.106 yang berjudul:

PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah.
Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wasaalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 16 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Skripsi



Ade Setiawan, M.Ak
NIP. 19800712 201403 1 003

PENGESAHAN

PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

Oleh:

DESSY SAPTARINI
NIM. 15.51.2.1.106

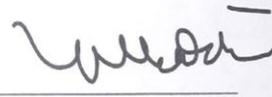
Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Senin tanggal 16 November 2020 /1 Robi'utsani 1442 dan dinyatakan
Telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelas Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:

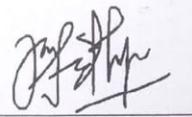
Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Samsul Rosadi, M.Si
NIK. 19871221 201701 1 165



Penguji II
Arif Nugroho, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19920516 201903 1 009



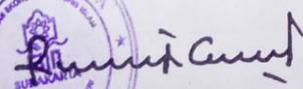
Penguji III
Devi Narulitasari, M.Si
NIP. 19890717 201903 2 019



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Surakarta




Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

Kehidupan terus berlanjut. Ketika kau kehilangan semangat, ingatlah kehidupan ini seperti daun yang jatuh, biarkan angin yang menerbangkannya.

(Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, Tere Liye)

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidal selalu mulus. Pada hari ke berapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tau, rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tau, kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk, untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Satu, dua keputusan itu membuat bangga, sedangkan sisanya lebih banyak menghasilkan penyesalan.

(Pulang, Tere Liye)

Bagaimanapun keadaan kita, mau sedih, bahagia, waktu tidak pernah berhenti menunggu. Waktu tetap berjalan.

(Rindu, Tere Liye)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Ya Allah Ya Rabb

Terimakasih atas segala nikmat yang telah Engkau Berikan

Serta ujian yang tak melebihi batas kemampuan hamba-Mu ini

Tak ada satupun yang bisa terjadi, kecuali atas kehendak dan kuasa-Mu

Sebuah karya sederhanaku ini kupersembahkan untuk:

Orang tuaku tercinta Ibu Sri Lestari, yang telah mendidik, merawat, memberikan semangat, dan doa yang tak terhingga, terimakasih atas keArtantri dkk dan peArtantri dkkmu yang senantiasa mengalir hanya untuk membahagiakan kami anak-anakmu.

Adikku tersayang Siti Aisyah Puji Astuti yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

Keluarga besarku Pakdhe, Budhe, Paklik, Bulik, Sepupu-sepupuku Erlinda, Lia, Eka, Hasbi terimakasih karena sudah mau saya repotkan tanpa mengeArtantri dkk dan senantiasa selalu memberikan dukungan.

Sahabat-sahabatku Sabil, Reza, Dea terimakasih selalu memberikanku semangat serta masukkan dalam setiap aktivitas. Terimakasih telah menjadi teman diskusi saya, teman curhat, teman main, teman makan, dan berbagai kenangan yang tidak habis-habisnya untuk diceritakan. Semoga kita tetap jadi teman dunia akhirat.

Aminn...

Teman-teman dekatku Eko, Sarwanti, Jundul, FU, Fadlu, Angga, Yunita, Nurroh, Arifah, Fia, Dwi, Farida terimakasih atas doa dan dukungannya, terimakasih telah sudah mau menjadi teman saya, teman diskusi, teman muncak, teman *hang out*.
Teman-teman Akuntansi Syariah Kelas C angkatan 2015, yang sudah memberikan warna-warni selama masa perkuliahan.

Dan semua pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Kuucapkan terimakasih yang tak ada habisnya...

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Er. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-procurement* dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Dr. Mohammad. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Anim Rahmayati, M. Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Awan Kostrad Diharto, SE., M.Ag, selaku dosen Pembimbing Akademik.
5. Ade Setiawan, M.Ak, selaku dosen Pembimbingan Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan membantu kelancaran dalam urusan administrasi.
7. Ibu saya, Sri Lestari serta adik saya Siti Aisyah Puji Astuti, karena merekalah yang berperan paling penting dalam memberikan dukungan, semangat, materi dan doa yang dipanjatkan untuk masa depan saya dan adik saya.
8. Sahabat dekatku Sabil, Reza, Dea, terimakasih selalu memberikan semangat dan keceriaan kalian untuk penulis menyusun skripsi ini.
9. Keluarga besarku Pakdhe, Budhe, Paklik, Bulik, Sepupu-sepupuku Erilinda, Lia, Eka, Hasbi, terimakasih sudah mau direpotkan tanpa mengeArtantri dkk.
10. Teman-teman AKS C 2015 dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas segala bantuan, dukungan, dan semangat yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balsan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 16 Oktober 2020

Penulis

ABSTRACT

The purpose of this study was to see the effect of the application of e-procurement on fraud prevention in the Surakarta City Government. The population used in this study were all employees of the Electronic Procurement Service (LPSE) and the Procurement Service Unit (ULP) as many as 58 people. The sample used was 58 people with saturated sampling techniques or census. The type of data in research using primary data is data obtained directly from the first hand by the researcher. Analysis of the model in this study using multiple linear regression analysis with the help of the SPSS program version 20

The results of the analysis show that the planning stage (X1), the tender document preparation stage (X4), and the announcement stage (X6) have an effect on fraud prevention. Meanwhile, the committee formation stage (X2), the prequalification stage (X3), the bid evaluation stage (X5), the rebuttal stage (X7), and internal control (X8) have no effect on fraud prevention.

Keywords: E-procurement, Fraud

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap pencegahan fraud pada Pemerintah Kota Surakarta. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua pegawai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebanyak 52 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 52 orang dengan teknik pengambilan sampel jenuh atau sensus. Jenis data pada penelitian menggunakan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tangan pertama oleh peneliti. Analisis model dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 20

Hasil analisis menunjukkan bahwa tahap perencanaan (X1), tahap penyusunan dokumen lelang (X4), dan pengumuman (X6) berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan tahap pembentukan panitia (X2), tahap prakualifikasi (X3), tahap evaluasi penawaran (X5), tahap sanggahan (X7), dan pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Kata kunci: *E-procurement, Fraud*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN BUKAN PERNYATAAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
<i>ABSTRACT</i>	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9

1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.7 Jadwal Penelitian	10
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Kajian Teori.....	12
2.1.1 Pencegahan <i>Fraud</i>	12
2.1.2 Sistem <i>E-procurement</i>	13
2.1.3 Pengertian <i>E-Procurement</i>	13
2.1.4 Tahap Perencanaan <i>E-Procurement</i>	15
2.1.5 Tahap Pembentukan Panitia <i>E-Procurement</i>	15
2.1.6 Tahap Prakualifikasi <i>E-Procurement</i>	16
2.1.7 Tahap Penyusunan Dokumen <i>E-Procurement</i>	17
2.1.8 Tahap Evaluasi Penawaran	18
2.1.9 Tahap Pengumuman	18
2.1.10 Tahap Sanggahan.....	19
2.1.11 Pengendalian Internal	19
2.1.12 <i>Fraud</i>	20
2.1.13 Kajian Keislaman.....	24
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan.....	28
2.3. Kerangka Berfikir	32
2.4. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian	39

3.2. Jenis Penelitian	39
3.3. Populasi, Sample, dan Teknik Pengambilan Sample	39
3.3.1 Populasi.....	39
3.3.2 Sample.....	40
3.3.3 Teknik Pengambilan Sample.....	40
3.4. Data dan Sumber data.....	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data	40
3.6. Variabel Penelitian	41
3.6.1 Variabel Independen	41
3.6.2 Variabel Dependen.....	42
3.7. Definisi Operasional Variabel	42
3.8. Teknik Analisis Data	45
3.8.1 Uji Kualitas Data.....	46
3.8.2 Uji Asumsi Klasik.....	47
3.8.3 Uji Ketepatan Model.....	49
3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda	50
3.8.5 Uji t	51

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian	52
4.2. Uji Kualitas Data	53
4.2.1 Uji Validitas	53
4.2.2 Uji Reliabilitas	55
4.3. Uji Asumsi Klasik	56

4.3.1 Uji Normalitas	56
4.3.2 Uji Multikolinearitas	57
4.3.3 Uji Heterokedastisitas	58
4.4. Uji Ketepatan Model	60
4.4.1 Uji F	60
4.4.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	60
4.5. Analisis Regresi Linier Berganda.....	61
4.6. Uji t.....	63
4.7. Pembahasan Hasil Analisis Data	68
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	76
5.2. Keterbatasan Penelitian	77
5.3. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perkara	2
Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan.....	28
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	42
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Validitas.....	53
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas	55
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Normalitas	57
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Multikolonieritas	58
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	59
Tabel 4.6 Hasil Uji F.....	60
Tabel 4.7 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	60
Tabel 4.8 Hasil Regresi	61
Tabel 4.9 Hasil Uji t.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	32
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Penelitian	82
Lampiran 2. Kuisisioner Penelitian	83
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	89
Lampiran 4. Tabulasi Data.....	90
Lampiran 5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	92
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup.....	103
Lampiran 7. Cek Plagiarisme	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional guna mewujudkan pembangunan di Indonesia. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat terlepas dari aktivitas pengadaan barang dan jasa. Salah satunya di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain.

Sektor pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang menyerap dana terbesar dalam penyaluran APBN/APBD di luar subsidi dan belanja pegawai. Menurut Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), tercatat sekitar 31,2% dari alokasi APBN digunakan untuk proye pengadaan barang/jasa, hal ini dapat dilihat dari data rencana anggaran pada tahun 2010, dimana pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 327 triliun untuk memenuhi rencana pembangunan belanja langsung melalui proses pengadaan barang/jasa (Witanto, 2012).

Pengadaan barang dan jasa dinilai sebagai masalah krusial, terbukti dengan ditemukannya kasus-kasus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Kategori penanganan kasus sepanjang tahun 2017 terdiri dari 93 perkara penyusunan, 15 perkara pengadaan barang dan jasa, dan 5 perkara tindak pidana pencucian uang (<https://www.kpk.go.id/>, 2018).

Tabel 1.1
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara

Perkara	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
Pengadaan barang/jasa	15	14	14	15	17	75
Perizinan	5	1	1	2	1	10
Penyuapan	20	38	79	93	168	398
Pungguan	6	1	1	0	4	12
Penyalahgunaan anggaran	4	2	1	1	0	8
TPPU	5	1	3	8	6	23
Merintang proses KPK	3	0	0	2	3	8
Jumlah	58	57	99	121	199	534

Sumber: <https://acch.kpk.go.id/>, 2018

Menurut pakar ekonomi Soemitro Dojohadikusumo bahwa perkiraan jumlah kebocoran yang terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa itu antara 30 sampai 50 persen dari nilai total APBN yang dialokasikan untuk membiayai sektor tersebut, sehingga dengan asumsi dari nilai anggaran yang disalurkan sekitar 327 triliun, maka nilai kebocorannya sekitar 98,1 sampai 163,5 triliun dalam satu tahun anggaran (Witanto, 2012).

Besarnya jumlah dana yang disediakan oleh instansi pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa menjadi titik awal terjadinya *fraud*. Kecurangan atau yang biasa disebut dengan *fraud* merupakan praktik yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan, baik untuk pribadi maupun kelompok yang dapat merugikan pihak lain.

Sistem lama pada proses pengadaan barang/jasa sangat memungkinkan terjadinya *fraud*. Panitia pengadaan barang/jasa memiliki ruang interaksi yang lebih intens dengan pihak penyediaan barang/jasa (vendor) yang mengakibatkan adanya kemungkinan terjadinya penyimpangan. Ada beberapa modus *fraud* dalam pengadaan barang/jasa seperti yang disebutkan oleh Husodo (2010) antara lain, pemalsuan, penyuapan, pemerasan, penggelapan, uang komisi, bisnis orang dalam, nepotisme, penunjukan langsung, mengurangi kualitas dan kuantitas barang/jasa, hingga *mark up* harga.

Oeyoen dan Yulianto (2011) juga mengungkapkan bahwa, sebuah survei yang dilaksanakan oleh *Indonesian's Procurement Watch* pada tahun 2010, sebanyak 89 persen perusahaan mengatakan bahwa mereka perlu menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan kontrak. Pemerintah memperkirakan bahwa kerugian dari korupsi dalam pengadaan pemerintah di Indonesia mencapai sebesar US\$ 4 milyar setiap tahunnya.

Untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi.

Salah satu solusi dalam mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa yaitu dengan menerapkan *e-procurement*. *E-procurement* bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan

persaingan usaha sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* (Perpres No. 54 tahun 2010).

Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Sehingga diharapkan dengan implementasi *e-procurement* dapat menjadi jalan untuk mengatasi kecurangan/*fraud* dalam pengadaan barang dan jasa yang berakibat merugikan keuangan negara.

Studi yang dilakukan oleh Wibawa (2014) menunjukkan bahwa terbukti ada perbedaan transparansi antara sebelum dan sesudah penerapan *e-Procurement* di Kementerian Keuangan. Hasil studi tersebut menunjukkan ada peningkatan kualitas transparansi, keterbukaan peluang dan aturan tender, kejelasan aturan dalam dokumen pengadaan, penyampaian *addendum* dokumen pengadaan, kecukupan waktu pengadaan, penerapan prinsip terbuka dan bersaing, kemudahan sanggahan dan aduan, kemudahan mengikuti tender dan keterbukaan penyampaian hasil evaluasi termasuk hal-hal yang menggugurkan.

E-procurement merupakan sistem yang dibutuhkan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya *fraud* dan kebocoran anggaran. *E-procurement* dianggap penting dikarenakan instrumen dalam sistem tersebut dapat meminimalisir terjadinya pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam proses lelang. Udoyono (2012) juga menegaskan bahwa *e-procurement* dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui *e-procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional.

Tujuan utama dari penerapan pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement* adalah diharapkan akan menjadi aplikasi yang mampu mendukung pelaksanaan perwujudan kinerja yang lebih baik di kalangan internal instansi pemerintah maupun pihak ketiga, serta dapat membantu menciptakan Pemerintah yang bersih. Selain itu, *e-procurement* diharapkan dapat menekan terjadinya kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Kecurangan yang terjadi pada pengadaan barang/jasa bisa diminimalisir dengan adanya *e-procurement* karena memiliki beberapa tahap dalam pengadaan barang dan jasa. LKPP (2011) menjelaskan bahwa tahapan yang dapat dilakukan dengan *e-procurement* yaitu tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, penjelasan, tahap pemasukan dan pembukaan dokumen, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman, dan tahap sanggahan.

Menurut Indonesia *E-Procurement Watch* dalam Purwanto (2008) tahap-tahap *e-procurement* ditemukan banyak terjadinya *fraud* seperti pengelembungan dana, panitia tidak transparan, dokumen administrasi tidak memenuhi syarat, rekayasa kriteria evaluasi, pengumuman lelang fiktif, penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan/cenderung lebih tinggi dari harga pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Faisol dkk dkk (2014) mengungkapkan bahwa tahap-tahap pengadaan barang dan jasa menggunakan elektronik tidak sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kecurangan. Terdapat beberapa tahap pengadaan barang dan jasa yang tidak mampu mencegah terjadinya kecurangan pengadaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Artantri dkk (2010) dari 108 kuesioner yang dibagikan kepada responden yang berasal dari anggota ULP dan LPSE diketahui bahwa *e-procurement* telah berhasil berperan dalam pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa.

Selain *e-procurement* yang diterapkan sebagai salah satu solusi dalam mencegah kemungkinan terjadinya *fraud*, juga perlu adanya pengendalian internal yang baik dalam perusahaan. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan, dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah, maka kemungkinan terjadinya *fraud* sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya *fraud* dapat diperkecil.

Adanya fenomena kasus suap terkait proyek pembangunan sistem penyedia air minum (SPAM) diberbagai daerah yang melibatkan PT. Wijaya Kusuma Emindo, PT. Tashida Sejahtera Perkasa, kepala satuan kerja SPAM strategi Lampung, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kepala satuan kerja SPAM darurat, dan PPPK SPAM Toba 1 merupakan merupakan kasus yang terlihat bahwa adanya indikasi lemahnya Satuan Pengawas Internal di badan usaha yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan serta belum sepenuhnya memahami ketentuan dan lemahnya koordinasi dengan pihak yang terkait (www.nasional.kompas.com, 12 Februari 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2013) mengungkapkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap *Good Corporate Governance*,

Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Huda dkk (2018) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal dan sistem pengadaan barang/jasa berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*), sedangkan kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Penelitian ini menggunakan Pemerintah Kota Surakarta sebagai objek karena Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang berhasil menerapkan *E-procurement*. Namun pada tahun 2016 Kejari Kota Solo menangkap direktur CV. Pratama Raya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Gear Box yang menyebabkan kerugian PT. Perkebunan Negara (PTPN) IX (Persero) sebesar Rp. 725 juta. Sebelumnya pada tahun 2013 seorang Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surakarta ditangkap karena melakukan korupsi proyek pertamanan Kota Solo tahun 2010 yang menyebabkan kerugian Rp. 56 juta (www.solopos.com, 2018).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kategori penanganan kasus sepanjang tahun 2017 terdiri dari 93 perkara penyusunan, 15 perkara pengadaan barang dan jasa, dan 5 perkara tindak pidana pencucian uang.

2. Kota Surakarta yang menjadi objek pada penelitian ini merupakan kota yang sudah menerapkan *e-procurement* akan tetapi masih ditemukan kasus tindak pidana korupsi sektor pengadaan barang/jasa.

1.3. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan masalah yang muncul maka peneliti membatasi permasalahan. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan penulis terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Variable dependen yang diteliti adalah pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.
2. Variable independen yang digunakan untuk pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta adalah *e-procurement* yang memiliki beberapa tahapan yang meliputi tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi dokumen penawaran, tahap pengumuman, dan tahap sanggahan, serta pengendalian internal.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tahap perencanaan dalam *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta?

2. Apakah tahap pembentukan panitia dalam *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta?
3. Apakah tahap prakualifikasi dalam *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta?
4. Apakah tahap penyusunan dokumen lelang dalam *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta?
5. Apakah tahap evaluasi penawaran dalam *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta?
6. Apakah tahap pengumuman dalam *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta?
7. Apakah tahap sanggahan dalam *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta?
8. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta?.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan yang bermanfaat untuk menambah informasi mengenai *e-Procurement* dan

pengendalian internal bagi pembaca, serta dapat menjadi bahan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Kota Surakarta, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, pengetahuan, dan bukti untuk dijadikan bahan evaluasi dari penerapan *e-Procurement* dan pengendalian internal yang telah diterapkan.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai pengetahuan untuk menambah informasi mengenai penerapan *e-Procurement* pemerintah dan pengendalian internal.

1.7. Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal dari pembahasan penelitian yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi sampel dan teknik pengumpulan sampel, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai analisis data penelitian dan pembahasan mengenai hasil-hasil serta temuan-temuan dari penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang penulis lakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi untuk menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*, yaitu memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, menurunkan tekanan pada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya dan mengeliminasi alasan untuk membenarkan atau rasionalisasi *fraud* yang dilakukan (BPKP, 2008).

Menurut *The Institut of Internal Auditor*, pencegahan *fraud* melibatkan tindakan-tindakan yang diambil untuk mencegah pelaksanaan kecurangan dan membatasi ekposur kecurangan itu ketika terjadi (Widiyarta dkk, 2017).

Fraud dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengendalian internalnya. Pengendalian internal aktif adalah *to prevent* yang berarti mencegah. Sedangkan pengendalian internal pasif adalah *to deter*, mencegah karena konsekuensinya terlalu besar, membuat jera (Tuanakotta, 2010).

Menurut Amrizal (2004) pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara membangun struktur pengendalian internal yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi dan mengefektifkan fungsi internal audit (Faisol dkk, 2014).

Pope dalam Faisol dkk (2014) mengemukakan tentang pencegahan *fraud* antara lain memperkuat kerangka hukum, prosedur transparan, membuka

dokumen tender, evaluasi penawaran, pelimpahan wewenang, pemeriksaan dan audit independen.

2.1.2 Sistem E-*procurement*

Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) merupakan sebuah model aplikasi elektronik yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *e-procurement* atau e-pengadaan yang berusaha mengatur transaksi bisnis melalui teknologi komputer (www.sepp.depkominfo.go.id, 2019).

SePP dikembangkan oleh pemerintah Indonesia melalui Departemen Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2004. SePP memiliki berbagai aplikasi yang akan mendukung semua proses transaksi yang dilakukan. Aplikasi tersebut terdiri dari empat modul utama dan tiga modul pendukung.

2.1.3 Pengertian E-*procurement*

Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa:

“Pengadaan secara elektronik atau *E-procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang undangan.”

Purwanto dalam Faisol dkk (2014) mendefinisikan *e-procurment* adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang dan jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pengadaan yang efektif, efisien, dan terintegrasi.

Menurut Nightisabha, dkk (2009) *e-procurement* adalah kegiatan yang dilakukan oleh sektor publik baik itu pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga publik lain termasuk Badan Usaha Milik Negara dengan menggunakan fasilitas teknologi internet yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan landasan hukum Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2006.

Menurut Sutedi (2012) *E-procurement* sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet.

Definisi lain menurut Willem Siahaya (2012) mengenai *e-procurement* bahwa pengadaan secara elektronik (e-Proc) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (Jaringan internet) atau electronic data interchange (EDI).

Berdasarkan beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa *e-procurement* merupakan suatu sistem pengadaan barang/jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer yang mencakup pembelian dan penjualan secara online agar lebih efektif dan efisien, serta mengurangi proses-proses bisnis yang tidak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa perusahaan ataupun instansi.

2.1.4 Tahap Perencanaan *E-procurement*

Tahap awal dari pengadaan adalah dengan melakukan perencanaan. Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK (Pejabat Pembuat Kometmen) dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Di awal, pihak purchasing akan melakukan pengajuan proposal mengenai pembelian bahan baku untuk produksi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah harga, waktu, dan anggaran yang dianggarkan (UU No.70 tahun 2012).

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola atau penyedia. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan pengadaan barang/jasa, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.

2.1.5 Tahap Pembentukan Panitia *E-procurement*

Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang melakukan pengadaan (UU No. 70 tahun 2012). Panitia pengadaan dapat melakukan aktivitas utama dalam pelaksanaan *e-procurement* seperti input dan edit pengumuman lelang, upload dokumen, download dokumen penawaran, evaluasi dokumen, penentuan pemenang dan sebagainya. Panitia lelang juga dapat mengakses data-data peserta lelang, selama

data-data tersebut berkaitan dengan kegiatan pelelangan yang sedang diikuti. Tetapi fungsi ini hanya sebatas pada melihat saja, tanpa melakukan fungsi input, edit, dan *delete*, serta aktivitas lain yang dapat berpengaruh terhadap perubahan data-data perusahaan.

2.1.6 Tahap Prakualifikasi *E-procurement*

Prakualifikasi merupakan suatu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan dokumen penawaran. Proses penilaian kualifikasi ini harus dilakukan secara adil, transparan, sehingga mendorong terjadinya persaingan yang sehat. Agar proses penilaian kualifikasi menjadi efisien maka data yang diperlukan dalam penilaian cukup mengirim data kualifikasi melalui LPSE sesuai jadwal yang ditentukan. Jika terdapat peserta pengadaan barang/jasa yang memalsukan datanya maka pihak panitia pengadaan barang/jasa akan mengenakan sanksi kepada peserta pengadaan barang/jasa tersebut berupa pemasukan peserta pengadaan barang/jasa yang ke dalam daftar hitam selama 2 tahun, dimana peserta tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Indonesia selama 2 tahun.

Menurut UU No. 70 tahun 2012 proses pengadaan barang/jasa penggunaan metode prakualifikasi dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pemilihan penyedia jasa konsultasi.
2. Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks melalui pelelangan umum.

3. Pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan, dengan nilai HPS paling tinggi Rp. 200.000.000.
4. Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang melalui penunjukan langsung, kecuali untuk penanganan darurat.

2.1.7 Tahap Penyusunan Dokumen Lelang *E-procurement*

Di dalam sistem lelang konvensional, kita mengenal sistem satu sampul, dua sampul, dan dua tahap. Untuk *e-procurement* dikenal yang namanya satu file dan dua file. Jika dulunya berupa sampul, sekarang berganti menjadi file. Dengan sistem ini, maka penyedia tidak perlu repot-repot menyiapkan dana untuk fotokopi semua dokumen pendukung kualifikasi (akta, SIUP, kontrak, dll) serta dokumen administrasi maupun teknis. Seluruh dokumen yang sifatnya fisik, diganti menjadi elektronik dalam format PDF atau JPEG.

Sistem *e-procurement* telah menyediakan sebuah aplikasi khusus yang akan menggabungkan seluruh file yang akan dikirim sekaligus melakukan enkripsi data agar aman dari kejahatan dunia maya. Aplikasi ini dibuat oleh Lembaga Sandi Negara dan dapat diunduh pada akun masing-masing penyedia. Setelah dikompres dan dienkripsi, maka seluruh dokumen yang sudah disiapkan (dokumen administrasi, teknis dan harga untuk sistem satu sampul; dan dokumen administrasi dan teknis untuk dua sampul) akan menjadi satu file saja. Inilah yang disebut dengan sistem satu file, dan ini yang dikirim ke panitia untuk dilakukan evaluasi (<https://eproc.lkpp.go.id>, 2019).

2.1.8 Tahap Evaluasi Penawaran

Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia terhadap semua penawaran yang dinyatakan lulus pada saat pembukaan penawaran. Evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan biaya. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila syarat-syarat yang diminta menurut dokumen lelang dipenuhi dan isi setiap dokumen benar dan ditandatangani direktur. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila memenuhi spesifikasi teknik barang yang ditawarkan berdasarkan contoh dan gambar-gambar yang ditetapkan dalam dokumen lelang (<https://eproc.lkpp.go.id>, 2019).

Apabila dalam evaluasi teknis ada hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, panitia melakukan klarifikasi dengan penyedia barang/jasa. Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara. Evaluasi kewajaran harga/biaya merupakan total harga yang ditawarkan secara keseluruhan. Bilamana terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf. Panitia lelang melakukan koreksi aritmatik terhadap hal-hal atas kesalahan penjumlahan dan pengalihan harga volume dengan harga satuan pekerjaan.

2.1.9 Tahap Pegumuman

Pada sistem konvensional, pengumuman dipasang pada papan pengumuman di institusi masing-masing. Sedangkan untuk sistem *e-procurement*, pengumuman pemenang dapat dilihat pada website LPSE serta seluruh peserta

akan dikirim email secara resmi yang berisi pengumuman pemenang. Pengumuman tidak hanya berisi nama perusahaan pemenang, melainkan juga akan memperlihatkan siapa saja yang kalah, mengapa sampai kalah, gugurnya pada tahapan mana, kenapa sampai gugur dan berapa harga masing-masing peserta. Jadi, setiap peserta tidak akan berpraduga yang tidak-tidak mengenai hasil pengadaan. Masing-masing secara terbuka akan mengetahui kesalahannya (<https://eproc.lkpp.go.id>, 2019).

2.1.10 Tahap Sanggahan

Dari dua tahapan sanggah (sanggah awal dan sanggah banding), *e-procurement* hanya melaksanakan satu tahap saja, yaitu sanggah awal. Sanggahan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Sanggahan ini juga hanya dapat dilihat oleh perusahaan yang memberikan sanggahan. Sistemnya mirip dengan *aanwijzing* tetapi lebih dibatasi. PPK juga hanya bisa menjawab sanggahan ini sebanyak satu kali saja. Apabila peserta lelang tidak puas dengan jawaban PPK, maka dapat melakukan sanggah banding yang kembali kepada sistem konvensional, yaitu melalui surat kepada PA/KPA dan ditembuskan kepada Inspektorat dan unit pengawasan lainnya.

2.1.11 Pengendalian Internal

Menurut Sukrisno dalam Soleman (2013) pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas-entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai

tentang pencapaian tiga golongan tujuan yakni: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Arens dalam Soleman (2013) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan perusahaan inilah yang disebut dengan pengendalian dan secara kolektif disebut dengan pengendalian internal.

Mayangsari dalam Soleman (2013) pengendalian internal adalah penggunaan semua sumberdaya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Untuk itu, demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut, maka prosedur dan kebijakan harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara setiap aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan harus melalui sebuah sistem yang didesain untuk dapat mengarahkan, dan mengendalikan dan mengawasi rangkaian aktivitas sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara efisien dan efektif.

2.1.12 Fraud

The Institute of Internal Auditor (IIA) menyebutkan yang dimaksud dengan *fraud* adalah:

“An array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception”: diterjemahkan menjadi “Sekumpulan tindakan yang tidak

diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur *fraud* yang disengaja”.

Kitab Undang-undang Hukum Negara (KUHP) dalam Tuanakotta (2016) menyebutkan beberapa pengertian *fraud*:

1. Pasal 362 tentang Pencurian: “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
2. Pasal 372 tentang Penggelapan: “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”
3. Pasal 378 tentang Perbuatan Curang: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang”.

Suroso (2011) mendefinisikan *fraud* adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat.

Menurut Arfah (2011) *fraud* adalah suatu tindakan melawan hukum yang disengaja oleh pihak dari dalam maupun luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan orang lain.

Faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*, juga dapat dijelaskan melalui *Gone Theory*. *Gone Theory* terdiri atas *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan) dan *exposure* (hukuman untuk efek jera).

Greed, berkaitan dengan keserakahan seseorang yang tidak puas pada keadaan dirinya. *Need* merupakan sikap mental yang tidak pernah merasa cukup. *Opportunity* merupakan sistem yang memberikan peluang untuk terjadinya *fraud*. *Eksposures* berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku *fraud* apabila pelaku ditemukan melakukan *fraud* (Faisol dkk, 2014).

Penyebab *fraud* menurut *Gone Theory* dapat dikelompokkan menjadi faktor individu dan faktor organisasi (Suroso, 2011). Faktor *greed* dan *need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku *fraud* (disebut juga faktor individual). Faktor *opportunity* dan *exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan *fraud* (disebut juga faktor generik/umum).

Selain *Gone Theory fraud* juga disebabkan karena *fraud triangle* (segitiga kecurangan) yang terdiri dari *pressure*, *perceived opportunity*, *rationalization* (Tuanakotta, 2016). Kecurangan bisa berawal dari tekanan (*pressure*) yang dialami seseorang, dimana orang ini mempunyai kebutuhan yang mendesak tetapi tidak bisa berbagi dengan orang lain.

Menurut Tuanakotta *perceived opportunity* menjadi salah satu penyebab terjadinya *fraud*, dimana pelaku kejahatan mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Tahap terakhir

dari segitiga kecurangan adalah *rationalization* (rasionalisasi) atau mencari pembenaran sebelum melakukan kecurangan. Maksudnya adalah melakukan mencari pembenaran atas kejahatan yang dilakukannya.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) *fraud* terdiri dari tiga penyimpangan, yaitu:

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*

3. Korupsi (*Corruption*)

Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

2.1.13 Kajian Keislaman

Menjadi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan amanah dan juga jalan ibadah yang mulia. Tak jarang perjuangan dalam jalan ibadah melalui jalur praktisi pengadaan ini dilalui dengan sebuah proses yang berat. Adanya ancaman, intervensi, iming-iming kebathilan, ajakan dzalim dan bentuk konotasi lainnya bisa ditemukan. Pilihan hati kadang sangat dipengaruhi keimanan, keteguhan hati, ketakutan azab Allah SWT, kecintaan keluarga atas kebarokahan hidup, atau malah dipengaruhi sisi negatif seperti sistem buruk yang berlaku, rasa tak enak hati, nafsu duniawi, dan ketidakadaan niat mengkaji yang haq dan bathil.

Tak semua orang memasang niat dari awal akan memilih jalur praktisi pengadaan sebagai pilihan hidup untuk mendapatkan rezeki. Bisa jadi semula hanya karena penugasan atau pilihan atas tanggungjawab. Namun ketika terjun dan terlibat dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, berbagai situasi fisik dan nuansa kebatinanpun bisa terjadi. Aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan keuangan negara ini sontak menjadi sebuah pergulatan hati ketika kesempatan untuk mendapatkan sesuatu atas yang telah dilakukan.

Cukup bijak dan benar ketika target capaian atas pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa ini akan menghasilkan sesuatu yang dibenarkan oleh peraturan, seperti perolehan honorarium dan tunjangan sesuai standar yang diberlakukan dan berdasarkan kinerja yang telah diperbuat. Lelah dalam bekerja tersebut bisa akan menjadi salah satu variabel layakanya rezeki tersebut untuk menyuapi diri sendiri, orang tua dan keluarga dengan suapan yang halal. Namun

akan menjadi sangat ironis dan berbahaya ketika perkerjaan dalam penggunaan keuangan negara ini menjadi kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang bathil dan haram.

Secara persepektif hukum pemerintahan, beberapa bentuk perolehan sesuatu (semisal: uang, barang, jasa) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang sifatnya didasari perbuatan jahat yang merugikan keuangan dan ekonomi negara, dapat dikategorikan korupsi. Aktivitas negatif yang berpotensi dapat dilakukan oleh pelaku pengadaan ini seperti:

1. Melakukan atau menerima suap atas transaksi pengadaan;
2. Dengan sengaja melakukan rekayasa atas penetapan harga barang dengan tujuan jahat;
3. Melakukan tindakan fiktif yang mengakibatkan terjadinya pembayaran negara tanpa ada prestasi kerja;
4. Dengan sengaja melakukan rekayasa proses pelelangan untuk menguntungkan pihak tertentu yang menyebabkan kerugian keuangan negara;
5. Memperoleh gratifikasi.

Secara persepektif hukum agama, perbuatan-perbuatan tersebut di atas jelas bertentangan dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Terkait perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Allah SWT memberi peringatan agar kecurangan dan penipuan itu dihindari, seperti pada firman-Nya di dalam Surah Ali Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَمَ وَمَنْ يَعْلَلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Khianat atas amanah atau tugas yang diberikan adalah perbuatan terlarang dan berdosa seperti ditegaskan Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Ayat ini mengandung pengertian bahwa mengkhianati amanah seperti perbuatan korupsi bagi seseorang adalah terlarang lagi haram.

Perbuatan korupsi dalam pengadaan barang/jasa untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan lalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat yang miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah. Oleh karena itu, amatlah lalim

seseorang yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, sehingga Allah SWT memasukkan mereka ke dalam golongan yang celaka besar.

Cukup ironis memang ketika perbuatan-perbuatan itu dilakukan tanpa disadari kalau semua itu adalah dzalim, haram dan berdosa. Bahkan lebih parahnya ketika disadari betapa dzalim, haram dan berdosa perbuatan tersebut, namun tetap dengan riang menjalankannya. Bahasa pengantar seolah penetral juga dipergunakan, seperti : “mau bagaimana lagi, sistem sudah seperti ini”, “Ini rezeki, tidak boleh ditolak”, “Tuhan kan Maha Pemaaf, pasti memaafkan”, “Susah menghindarinya, apa boleh buat”, “perintah atasan, dari pada nanti dipindah tugas”, dan kalimat-kalimat naif lainnya. Tak terpikirkah bahwa semua itu sudah menjadi ketentuan Allah SWT yang wajib Kita patuhi sebagai makhluk ciptaanNya.

Beratnya proses pengadaan kadang membuat persepsi karya kerja tersebut berhak untuk mendapat penghasilan lebih lain dari peraturan yang berlaku. Penyedia yang tidak berbagi dengan pihak pemerintah dalam pengelola pengadaan seolah dianggap salah. Bagi-bagi uang dari anggaran pengadaan seolah menjadi lumrah. Ditambah lagi standar biaya yang relatif kecil dan kebutuhan hidup yang besar menjadi katalisator membenaran atas persepsi salah tersebut.

Tak disadarikah bahwa rezeki kita sudah disiapkan oleh Allah SWT dengan ukuran dna takarannya masing-masing. Kita dipersilahkan mengambilnya dengan cara Kita masing-masing. Tentunya Kita yang memilih apakah sara yang baik atau cara yang dimurkai Allah SWT, kita pemegang kendali. Kendali diri ini lah yang menjadi bagian dari rangkaian ibadah dalam mencapai rezeki dengan

cara yang halal, sehingga apa yang kita dapatkan akan menjadi baik. Ingatlah, bahwa dalam diri Kita sesungguhnya telah tertanam benih-benih kebaikan sejak lahir dan secara naluriah ada keinginan untuk berbuat kebaikan dan menjadi manusia yang baik.

Sebetulnya kebaikan yang kita lakukan adalah untuk diri sendiri seperti firmanNya: “Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan” (QS. Al Jaatsiyah ayat 15). Allah SWT juga berfirman: “Dan setiap kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan kebaikan pula.” (QS. Ar Rahman ayat 60).

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1
Penelitian yang Relevan

Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Sample	Hasil Penelitian
Imam Agus Faisol dkk, Tarjo, Siti Musyarofah (2014)	Pengaruh Penerapan <i>E-procurement</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> di Sektor Publik	Metode Kuantitatif, populasi penelitian ii adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan <i>e-procurement</i> di pemerintah Kota Surabaya, sedangkan sampelnya adalah ULP Pemkot Surabaya, PKK di SKPD Pemkot	Tahap perencanaan dan penyusunan dokumen lelang berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> , sedangkan tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman pemenang lelang dan tahap sanggahan tidak berpengaruh terhadap

Tabel berlanjut...

Lanjutan Tabel 2.1

		Surabaya, dan penyedia barang dan jasa menggunakan metode <i>purposive sampling</i> .	pencegahan <i>fraud</i> .
Artantri dkk Putu Resti Mega Artantri, Lilik Handajani, Endar Pituringsih (2016)	Peran <i>E-procurement</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah di Pulau Lombok	Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif, Populasi penelitian ini adalah ULP dan LPSE di Lombok, sedangkan sampelnya adalah terdiri dari anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Daerah di Pulau Lombok yang berjumlah 108 orang.	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa <i>e-procurement</i> memiliki peran untuk menekan <i>fraud</i> pada pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah di Pulau Lombok.
Yunita A. Messah dkk, Maria Y.Y. Asmat, H. A. Rizal (2013)	Kajian Persepsi Pelaku Jasa Kontruksi Tentang Kegiatan Pengadaan Jasa Kontruksi Secara <i>E-Procurement</i> di Kota Kupang	Teknik pengolahan dan analisis pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang dilakukan pada pengguna jasa di Dinas PU Provinsi NTT, Dinas PU kota Kupang, penyedia jasa yang memiliki kantor pusat dan kantor perwakilan di Kota Kupang.	Hasil penelitian ini adalah tahap pengumuman lelang, tahap pemasukan dokumen penawaran, dan pengumuman pemenang dapat diminimalkan kecurangannya dengan <i>e-procurement</i> . Sedangkan pada tahapan pembuktian kualifikasi serta klarifikasi dan

Tabel berlanjut...

Lanjutan Tabel 2.1

			negosiasi belum sepenuhnya dapat diminimalkan dengan <i>e-procurement</i> .
R D Pathak, Gurmeet Singh, Rakesh Belwal, Rafia Naz, R F I Smith (2008)	E-Governance, corruption and public service delivery: A comparative study of Fiji and Ethiopia	Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sample 800 responden (400 Fiji dan 400 Ethiopia), menggunakan metode <i>cronbach's alpha</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>e-Governance</i> dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengurangan korupsi.
Rusman Soleman (2013)	Pengaruh Pengendalian Internal dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif, Populasi penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah pada SKPD Kabupaten/Kota di Propinsi Maluku Utara sebanyak 134 SKPD, sedangkan sampelnya adalah 72 SKPD yang terdiri dari 144 orang yang dipilih menggunakan metode <i>purposive non random sampling</i> .	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.
Nurul Huda, Dadang Sadeli, Hermiyetti (2018)	Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Sertifikasi	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi dan sampel adalah seluruh pegawai Badan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan sistem pengadaan barang/jasa berpengaruh secara

Tabel berlanjut...

Lanjutan Tabel 2.1

	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 123 orang.	parsial terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>), sedangkan kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>).
Nashirotn Nisa Nurharjanti (2017)	Faktor-faktor yang Berhubungan dengan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik	Penelitian kuantitatif, populasi dan sample meliputi pejabat pembuat komitmen yang berjumlah 3 orang, panitia pengadaan berjumlah 22 orang, dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan berjumlah 25 orang di Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Universitas Berbasis menuju Badan Layanan Umum di Wilayah Kota Yogyakarta.	Hasil penelitian ini menemukan bahwa kualitas panitia pengadaan, kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan, etika pengadaan, lingkungan pengadaan dan penilaian risiko berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa.
Nur Hidayati, J. M. V Mulyadi (2017)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	Penelitian kuantitatif. Populasi sebanyak 129 orang di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang memiliki pengalaman 1 tahun. Sample 56 orang dengan teknik	Hasil penelitian ini adalah kualitas panitia pengadaan, sistem dan prosedur pengadaan, etika pengadaan dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap terjadinya <i>fraud</i> pengadaan

Tabel berlanjut...

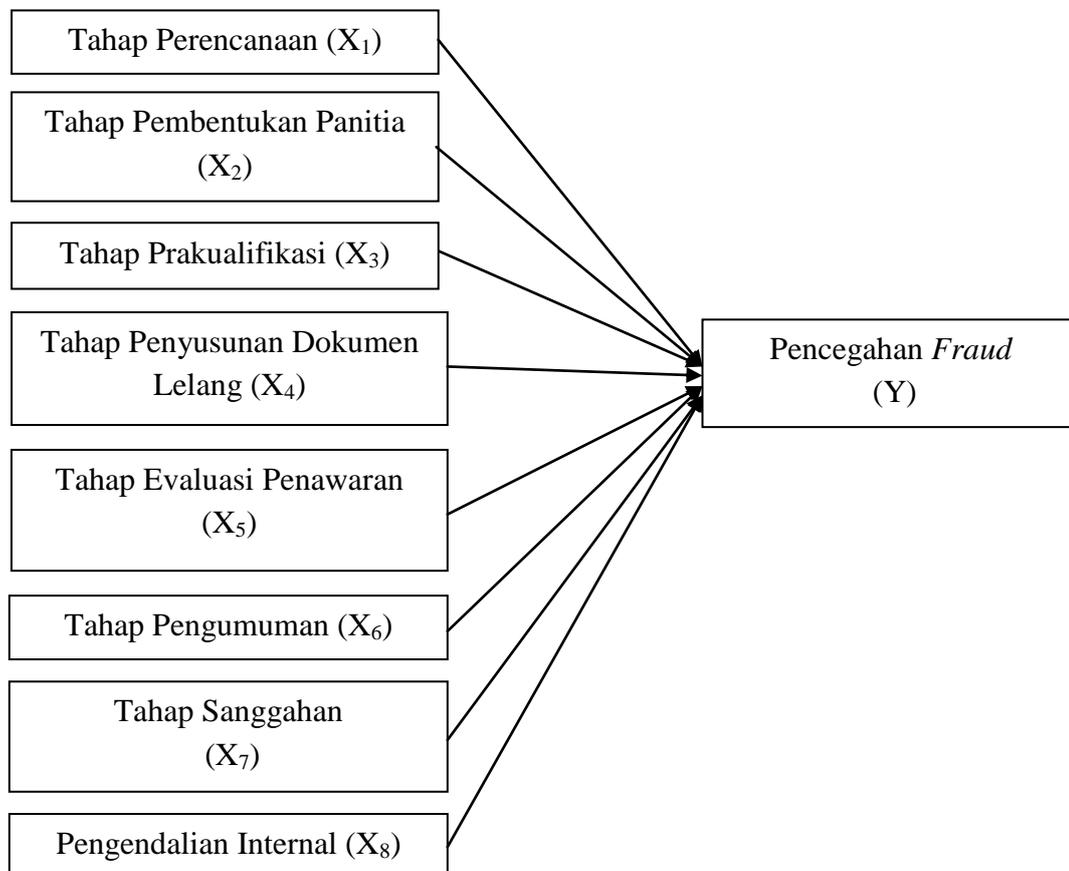
Lanjutan Tabel 2.1

		pengambilan sample yaitu rumus Slovin dengan <i>margin/sampling error</i>	barang/jasa. Sedangkan penghasilan panitia pengadaan tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya fraud pengadaan barang/jasa.
--	--	---	--

2.3. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini variable independen adalah *e-procurement* dan pengendalian internal sedangkan variable dependen adalah pencegahan *fraud*.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Tahap Perencanaan Terhadap Pencegahan *Fraud*

Perencanaan pengadaan adalah tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertujuan untuk membuat rencana pengadaan yang mempersiapkan dan mencantumkan secara rinci mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya, dan manfaat (Faisol dkk, 2014). Untuk mencegah kecurangan pada tahap perencanaan maka perlu meningkatkan transparansi, efektifitas, dan efisiensi pada tahap perencanaan. Apabila perencanaan dilakukan secara transparan, efektif, dan efisien maka kecurangan dapat dikendalikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Faisol dkk (2014), Messah dkk, (2013), dan Artantri dkk (2016) mengemukakan bahwa tahap perencanaan berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan fraud di sektor publik. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

H₁: Tahap perencanaan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

2.4.2 Pengaruh Tahap Pembentukan Panitia Terhadap Pencegahan *Fraud*

Tahap pembentukan panitia mempunyai kewenangan menyusun dokumen tender, menyusun dan menyeleksi peserta tender, melakukan kegiatan-kegiatan tender sampai dengan penetapan pemenang dan melaksanakan tugas secara profesional (Faisol dkk, 2014). Amrizal (2004) mengemukakan bahwa pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas, salah satunya disebabkan apabila pegawai yang dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas.

Pada tahap pembentukan panitia merupakan tahap yang paling penting, dimana pada tahap ini menyeleksi orang-orang yang bertanggungjawab dalam proses pengadaan. Panitia harus jujur dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Apabila panitia memiliki kejujuran dan integritas maka kecurangan dapat dicegah.

Penelitian yang dilakukan oleh Messah dkk (2013), Nurharjanti (2017), Hidayati dan Mulyadi (2017) menunjukkan hasil bahwa pembentukan panitia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₂: Tahap pembentukan panitia berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

2.4.3 Pengaruh Tahap Prakualifikasi Terhadap Pencegahan *Fraud*

Kegiatan prakualifikasi adalah penentuan seleksi terhadap sejumlah perusahaan calon peserta pelelangan, berdasarkan syarat administratif, teknis dan pengalaman serta seleksi terhadap kontraktor atau supplier, yang diperkirakan mampu melaksanakan pekerjaan yang akan ditender atau dilelangkan (Faisol dkk, 2014). Tahap prakualifikasi hampir sama dengan pembentukan panitia yang membedakan adalah jika pada tahap pembentukan panitia yang diseleksi panitia, maka pada tahap prakualifikasi yang diseleksi adalah perusahaan yang mengajukan proposal ke lembaga atau badan. Peran panitia dan calon supplier sama-sama penting, dimana apabila ada perusahaan yang diam-diam melakukan kecurangan maka tingkat kecurangan akan terus meningkat. Jadi penting untuk menyeleksi perusahaan, sehingga kecurangan dapat dicegah.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008), Messah dkk (2013), Artantri dkk (2016) mengemukakan bahwa tahap prakualifikasi mampu mengurangi terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₃: Tahap prakualifikasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

2.4.4 Pengaruh Tahap Penyusunan Dokumen Lelang Terhadap Pencegahan

Fraud

Penyusunan dokumen lelang adalah kegiatan yang bertujuan menentukan secara teknis persyaratan-persyaratan administrasi yang dibutuhkan dari pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa (Faisol dkk, 2014). Dengan adanya *e-procurement* pada tahap penyusunan dokumen lelang, maka syarat-syarat penyusunan dokumen lelang dapat disajikan dalam sistem secara online sehingga dengan adanya mekanisme tersebut memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengevaluasi jika terdapat kekeliruan. Hal tersebut dapat mempersempit terjadinya peluang evaluasi yang tidak sesuai dengan kriteria. Oleh karena itu, semakin transparan tahap penyusunan dokumen lelang maka semakin kuat *e-procurement* dalam mencegah adanya kecurangan.

Penelitian yang dilakukan Faisol dkk (2014), Messah dkk (2013), Artantri dkk (2016) mengemukakan bahwa tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* di sektor publik. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄: Tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

2.4.5 Pengaruh Tahap Evaluasi Penawaran Terhadap Pencegahan *Fraud*

Evaluasi penawaran lelang yaitu kegiatan pemeriksaan, penelitian dan analisis dari keseluruhan usulan teknis dari peserta pelelangan, dalam rangka untuk memperoleh validasi atau pembuktian terhadap harga penawaran yang benar, tidak terjadi kekeliruan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan (Faisol dkk, 2014). Aktivitas-aktivitas dalam tahap evaluasi penawaran merupakan bagian dari tahap pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Apabila pada proses evaluasi dilakukan dilakukan secara transparan maka kecuranganpun dapat dicegah.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008), Messah dkk (2013), Artantri dkk (2016) menjelaskan bahwa responden penelitian menyatakan setuju bahkan sangat setuju bahwa tahap evaluasi penawaran dapat mengurangi adanya indikasi kecurangan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₅: Tahap evaluasi penawaran berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

2.4.6 Pengaruh Tahap Pengumuman Terhadap Pencegahan *Fraud*

Peran *e-procurement* pada tahap pengumuman pengadaan barang dan jasa yaitu konten pengumuman sudah ditentukan aplikasi dan jika ada perubahan jadwal dalam *e-procurement* harus disertai alasan yang jelas. Konten

pengumuman dalam *e-procurement* memudahkan penyebaran informasi tentang adanya pengadaan barang dan jasa (Faisol dkk, 2014). Sehingga, kemudahan menyebarkan informasi tersebut mempersempit peluang terjadinya kecurangan. Ketika sebuah sistem semakin mudah meminimalisir terjadinya *fraud* maka akan semakin mudah untuk mencegah *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008), Messah dkk (2013), Artantri dkk (2016) mengemukakan bahwa tahap pengumuman mampu mengurangi terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₆: Tahap pengumuman berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

2.4.7 Pengaruh Tahap Sanggahan Terhadap Pencegahan *Fraud*

Tahap sanggahan yaitu tahapan yang memberikan kesempatan kepada peserta lelang yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya tentang keputusan panitia pengadaan (Faisol dkk, 2014). Apabila terdapat sanggahan, penyedia langsung dapat mengakses website dari lembaga/kementerian dan secara otomatis panitia harus menanggapi seluruh sanggahan. Transparansi dalam tahap sanggahan akan memudahkan dalam mencegah terjadinya kecurangan seperti sanggahan yang tidak seluruhnya ditanggapi dan sanggahan yang tidak substantif.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008), Messah dkk (2013), Artantri dkk (2016) mengemukakan bahwa tahap sanggahan mampu mengurangi

terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan pernyataan tersebut maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₇: Tahap sanggahan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

2.4.8 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara membangun struktur pengendalian internal yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi dan mengefektifkan fungsi internal audit (Amrizal, 2004). Pengendalian internal yang aktif biasanya dapat mencegah terjadinya *fraud*, yang merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan (Tuanakotta, 2016). Salah satu faktor yang mendorong terjadinya *fraud* adalah karena lemahnya pengendalian internal, maka perlu adanya peningkatan pengendalian internal, sehingga kecuranganpun dapat dicegah.

Penelitian yang dilakukan oleh R D Pathak et al (2008), Soleman (2013), Huda dkk (2018), Hidayati, Mulyadi (2017) mengungkapkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan pernyataan tersebut hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₈: Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Juni 2019 sampai selesai. Wilayah penelitian ini akan dilaksanakan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surakarta.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif disebut sebagai metode tradisional, *positivistik*, *scientific*, *confirmatory*, kuantitatif. Penelitian kuantitatif bersifat deduktif (Sugiyono, 2015). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

3.3 Populasi, Sample dan Teknik Pengambilan Sample

3.3.1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai LPSE yang berjumlah 30 orang dan seluruh pegawai ULP yang berjumlah 28 orang.

3.3.2. Sample

Sample merupakan bagian dari jumlah populasi yang memiliki karakteristik (Sugiyono, 2015). Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai LPSE dan ULP sejumlah 58 orang yang terlibat dalam proses *e-procurement*.

3.3.3. Teknik Pengambilan Sample

Teknik pengambilan sampel adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian (Sugiyono, 2015). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *sampling jenuh*, teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus.

3.4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh langsung dari tangan pertama oleh peneliti terkait dengan variable yang digunakan dalam penelitian tersebut (Sekaran, 2017). Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai LPSE dan ULP.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya untuk dijawab oleh responden (Sekaran, 2017). Kuesioner yang telah disiapkan oleh peneliti akan dimintakan respon kepada responden

dengan memberikan tanda centang pada kolom yang telah ditentukan. Kemudian instrumen berupa kuesioner dikembalikan kepada peneliti. Kuesioner terdiri dari 56 pertanyaan. Kuesioner diukur menggunakan skala likert dengan nilai 1-5 dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju kemudian skor yang digunakan dalam setiap pertanyaan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018):

1. Nilai 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Nilai 2 : Tidak Setuju (TS)
3. Nilai 3 : Netral (N)
4. Nilai 4 : Setuju (S)
5. Nilai 5 : Sangat Setuju (SS)

3.6. Variable Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu sifat atau nilai atau atribut dari suatu objek atau kegiatan atau orang yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti atau dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015). Variabel dalam penelitian ini adalah:

3.6.1. Variable Independen

Variable independen (bebas) merupakan variable yang dapat mempengaruhi atau yang dapat menjadi penyebab adanya perubahan atau munculnya variable dependen (terikat) (Sugiyono, 2015). Variable independen pada penelitian ini terdiri dari 2 variable yaitu *e-procurement* dan pengendalian internal.

3.6.2. Variable Dependen

Variable dependen (terikat) merupakan variable yang memperoleh pengaruh atau dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variable independen (bebas) (Sugiyono, 2015). Variable dependen pada penelitian ini adalah pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

3.7. Definisi Operasional Variable

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variable

Variable	Definisi	Indikator
Pencegahan <i>fraud</i> (Y)	Aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan. (COSO dalam Faisol dkk, 2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan SOP atau peraturan 2. <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> untuk panitia 3. Monitoring pelaksanaan tugas panitia 4. Monitoring dan pemeriksaan terhadap kondisi perusahaan secara langsung 5. Menerapkan nilai etika dan integritas terhadap panitia pengadaan 6. Standart pengendalian untuk menjamin terciptanya pengadaan yang transparan dan profesional 7. Sistem <i>e-procurement</i> dapat mencegah terjadinya kecurangan pengadaan barang dan jasa (Faisol dkk, 2014)

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 3.1

Tahap perencanaan (X1)	<p>Perencanaan pengadaan adalah tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertujuan untuk membuat rencana pengadaan (<i>Procurement Plan</i>) yang mempersiapkan dan mencantumkan secara rinci mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya, dan manfaat.</p> <p>(Faisol dkk, 2014)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan secara rinci mengenai target, waktu, mutu, biaya sesuai kebutuhan. 2. Penyusunan spesifikasi teknis dan kriteria pengadaan barang dan jasa. 3. Menentukan jadwal waktu pengadaan barang dan jasa dan melakukan pembagian dan pengaturan paket pengadaan menjadi beberapa paket proyek <p>(Faisol dkk, 2014)</p>
Tahap pembentukan panitia (X2)	<p>Pada tahap pembentukan panitia mempunyai kewenangan menyusun dokumen tender, menyusun dan menyeleksi peserta tender, melakukan kegiatan-kegiatan tender sampai dengan penetapan pemenang dan melaksanakan tugas secara profesional.</p> <p>(Faisol dkk, 2014)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip profesionalisme 2. Prinsip responsif 3. Prinsip akuntabel 4. Prinsip kredibel 5. Prinsip mandiri <p>(Faisol dkk, 2014)</p>
Tahap prakualifikasi (X3)	<p>Kegiatan prakualifikasi adalah penentuan seleksi terhadap sejumlah perusahaan calon peserta pelelangan, berdasarkan syarat administratif, teknis, dan pengalaman serta seleksi terhadap perusahaan (kontraktor/konsultan dan <i>supplier</i>), yang diperkirakan mampu melaksanakan pekerjaan yang akan ditender atau dilelangkan.</p> <p>(Faisol dkk, 2014)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat administratif 2. Syarat teknis 3. Pengalaman perusahaan dan kemampuan perusahaan melakukan lelang <p>(Faisol dkk, 2014)</p>
Tahap penyusunan dokumen lelang	<p>Penyusunan dokumen lelang adalah kegiatan yang bertujuan menentukan secara teknis dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dengan peraturan yang berlaku 2. Sederhana dan

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 3.1

(X4)	<p>persyaratan-persyaratan administrasi yang dibutuhkan dari pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa, mulai dari lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran, jenis, waktu pelaksanaan, dan metoda kerja dari keseluruhan pekerjaan yang akan dilelangkan.</p> <p>(Faisol dkk, 2014)</p>	<p>transparan</p> <p>3. Dokumen dikaji oleh pihak-pihak terkait dan dokumen terdiri dari lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran, jenis, waktu pelaksanaan dan metode kerja</p> <p>(Faisol dkk, 2014)</p>
Tahap evaluasi penawaran (X5)	<p>Evaluasi penawaran lelang yaitu kegiatan pemeriksaan, penelitian dan analisis dari keseluruhan usulan teknis dari peserta pelelangan, dalam rangka untuk memperoleh validasi atau pembuktian terhadap harga penawaran yang benar, tidak terjadi kekeliruan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan</p> <p>(Faisol dkk, 2014).</p>	<p>1. Menentukan evaluasi administrasi dengan mempertimbangkan faktor redaksional, keabsahan, jaminan penawaran dan aritmatik.</p> <p>2. Evaluasi teknis terhadap perusahaan dengan mempertimbangkan dokumen sertifikasi dari lembaga akreditasi yang kredibel.</p> <p>3. Evaluasi harga dengan menitikberatkan pada kesesuaian penawaran dengan kriteria yang disyaratkan panitia</p> <p>(Faisol dkk, 2014)</p>
Tahap pengumuman pemenang lelang (X6)	<p>Aktivitas yang wajib dilakukan pada tahap pengumuman.</p>	<p>1. Pengumuman dipasang di media massa dengan jangkauan yang luas sesuai besaran kontrak</p> <p>2. Pengumuman ditempelkan pula di kantor proyek.</p> <p>3. Pengumuman harus jelas dan rinci, sehingga sanggahan menjadi berkurang.</p> <p>4. Dilaksanakan dengan</p>

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 3.1

		waktu yang cukup dan pelaksanaannya tepat waktu dan tidak ditunda-tunda (Faisol dkk, 2014)
Tahap sanggahan (X7)	Tahap sanggahan yaitu tahapan yang memberikan kesempatan kepada para peserta pelelangan yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya tentang keputusan panitia pengadaan. (Faisol dkk, 2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia harus terbuka dan akomodatif dan memproses setiap sanggahan 2. Panitia mempublikasikan sanggahan dan tanggapan 3. Panitia harus segera melakukan investigasi untuk membuktikan kebenaran sanggahan dan pemerintah harus memberikan sanksi administratif yakni pembatalan tender, mencoret nama pemenang, dan pembubaran panitia jika sanggahan tersebut tidak benar (Faisol dkk, 2014)
Pengendalian Internal (X8)	Pengendalian internal merupakan sebuah prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai ujuan dan sarannya. (Soleman, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. lingkungan pengendalian 2. penilaian resiko 3. sistem informasi 4. kegiatan pengendalian 5. pemantauan. (Soleman, 2013)

3.8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan teknik analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) yang dibantu dengan aplikasi SPSS 2.0.

3.8.1 Uji Kualitas Data

Data memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena data akan menggambarkan variabel-variabel yang diteliti, sehingga benar atau tidaknya data akan sangat menentukan kualitas dan hasil dari penelitian. Benar atau tidaknya data tergantung dari instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Instrumen yang baik itu haruslah memenuhi persyaratan yang valid dan juga reliabel (Sugiyono, 2010).

1. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah selalu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α) melalui bantuan SPSS. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel atau handal apabila mampu memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Ghozali, 2018).

2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner dapat untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018).

Alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengujian validitas adalah dengan daftar pertanyaan yang telah diisi oleh responden dan kemudian akan diuji hasilnya guna untuk menunjukkan valid tidaknya data tersebut. Kuesioer dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikan 5% dan kuesioner dapat dikatakan tidak valid jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ dengan taraf signifikan yang sama 5%.

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik agar dapat menghasilkan model regresi yang baik. Pengujian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah dengan distribusi data normal atau yang mendekati normal (Totalia dan Hindrayani, 2013).

Untuk dapat mengetahui apakah data penelitian terdistribusi normal atau tidak adalah dengan melakukan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila dari uji tersebut diperoleh nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal. Dan

sebaliknya apabila data yang dihasilkan nilai signifikan $> 0,05$ maka data telah terdistribusi secara normal (Ghozali, 2014).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji mengenai apakah dalam model regresi terdapat atau ditemukan adanya korelasi antar variabel bebasnya (independen). Model regresi yang baik adalah yang seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabelnya. Multikolinieritas dapat dilihat dari *variance inflation factor* (VIF) dan nilai tolerannya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Apabila $VIF \geq 10$ dan nilai tolerance $\leq 0,10$ maka hal itu menunjukkan adanya multikolinieritas (Ghozali, 2018).

3. Uji Heterokedastisitas

Pada uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau sama maka disebut *homokedastisitas* dan apabila varians tersebut berbeda maka disebut dengan *heterokedastisitas* (Totalia dan Hindrayani, 2013).

Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedastisitas atau dengan kata lain yang tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas ini dapat diuji dengan uji statistik yaitu Uji *Glejser*. Uji *Glejser* ini dapat dilakukan dengan cara meregresikan nilai *absolute residual* (AbsUt) terhadap variabel independen yang lainnya, dengan mode persamaannya seperti berikut ini (Ghozali, 2014):

$$|Ut| = \alpha + \beta Xi + ui$$

Syarat sebuah model itu tidak terjadi heterokedastisitas adalah apabila signifikansi seluruh variabel independennya $> 0,05$. Apabila β signifikan maka tentu hal itu mengidentifikasi adanya heterokedastisitas dalam model regresi.

3.8.3 Uji Ketepatan Model

1. Uji F

Uji statistik F ini pada dasarnya adalah digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang digunakan atau yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2014). Dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah dengan probabilitas signifikansi yakni:

- a. Jika probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Jika probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

2. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien (R^2) yang nilainya antara 0-1. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati angka satu itu berarti bahwa variabel independennya mampu memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Apabila dalam model terdapat lebih dari dua variabel

independen, maka akan lebih baik jika menggunakan nilai Adjusted R^2 (Ghozali, 2014).

3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis yang ingin menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependennya. Adapun persamaannya yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \beta_7X_7 + \beta_8X_8 + e$$

Keterangan:

Y : pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta

α : konstanta

X1 : tahap perencanaan dalam *e-procurement*

X2 : tahap pembentukan panitia dalam *e-procurement*

X3 : tahap prakualifikasi dalam *e-procurement*

X4 : tahap penyusunan dokumen lelang dalam *e-procurement*

X5 : tahap evaluasi penawaran dalam *e-procurement*

X6 : tahap pengumuman dalam *e-procurement*

X7 : tahap sanggahan dalam *e-procurement*

X8 : pengendalian internal

β_1 - β_8 : koefisien regresi

e : standar error

3.8.5 Uji t

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial atau individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilihat dari besarnya *p-value* dan dibandingkan dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, dengan kriteria bahwa apabila *p-value* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan apabila *p-value* $> 0,05$ maka H_0 diterima (Ghozali,2014).

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pegawai Pemerintah Kota Surakarta yang aktif ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*), dimana data dikumpulkan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner disebarakan kepada responden dengan jumlah 30 di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan 28 di Unit Layanan Pengadaan (ULP), data yang bisa digunakan 52, enam kuisisioner tidak kembali.

Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui data yang diolah valid dan reliabel. Setelah data yang diuji lolos uji validitas dan reliabilitas maka selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

Data merupakan data primer yang diambil dengan metode kuisisioner dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Data yang diisi oleh responden berkaitan dengan pencegahan *fraud*, tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman, tahap sanggahan, pengendalian internal.

Dalam penelitian ini digunakan variabel dependen dan independen. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta, yang diberi simbol Y. Sedangkan variabel independennya terdiri dari tahap perencanaan sebagai X1, tahap pembentukan

panitia sebagai X2, tahap prakualifikasi sebagai X3, tahap penyusunan dokumen lelang sebagai X4, tahap evaluasi penawaran sebagai X5, tahap pengumuman sebagai X6, tahap sanggahan sebagai X7, pengendalian internal sebagai X8.

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas akan menguji masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dimana keseluruhan variabel penelitian memuat 26 pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan valid tidaknya pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: nilai signifikansi = 0.05, derajat kebebasan (df) = $n-2 = 52-2 = 50$, didapat $r_{tabel} = 0.273$. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai r positif, maka butir pernyataan dikatakan valid (Ghozali, 2018). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka hasil pengujian validitas dapat ditunjukkan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Pengujian Validitas

NO	INDIKATOR	r hitung	r tabel	KETERANGAN
1.	Perencanaan			
	- Indikator 1	0,716	0,273	VALID
	- Indikator 2	0,790	0,273	VALID
	- Indikator 3	0,824	0,273	VALID
	- Indikator 4	0,793	0,273	VALID
	- Indikator 5	0,717	0,273	VALID
	- Indikator 6	0,815	0,273	VALID
	- Indikator 7	0,710	0,273	VALID
2.	Pembentukan Panitia			
	- Indikator 1	0,720	0,273	VALID
	- Indikator 2	0,789	0,273	VALID
	- Indikator 3	0,714	0,273	VALID

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 4.1

	- Indikator 4	0,706	0,273	VALID
	- Indikator 5	0,805	0,273	VALID
	- Indikator 6	0,830	0,273	VALID
	- Indikator 7	0,794	0,273	VALID
3.	Prakualifikasi			
	- Indikator 1	0,818	0,273	VALID
	- Indikator 2	0,760	0,273	VALID
	- Indikator 3	0,441	0,273	VALID
	- Indikator 4	0,703	0,273	VALID
	- Indikator 5	0,781	0,273	VALID
	- Indikator 6	0,337	0,273	VALID
4.	Penyusunan Dokumen Lelang			
	- Indikator 1	0,546	0,273	VALID
	- Indikator 2	0,553	0,273	VALID
	- Indikator 3	0,570	0,273	VALID
	- Indikator 4	0,639	0,273	VALID
	- Indikator 5	0,693	0,273	VALID
	- Indikator 6	0,767	0,273	VALID
	- Indikator 7	0,752	0,273	VALID
5.	Evaluasi Penawaran			
	- Indikator 1	0,360	0,273	VALID
	- Indikator 2	0,390	0,273	VALID
	- Indikator 3	0,568	0,273	VALID
	- Indikator 4	0,575	0,273	VALID
	- Indikator 5	0,485	0,273	VALID
	- Indikator 6	0,499	0,273	VALID
6.	Pengumuman			
	- Indikator 1	0,752	0,273	VALID
	- Indikator 2	0,797	0,273	VALID
	- Indikator 3	0,457	0,273	VALID
	- Indikator 4	0,555	0,273	VALID
	- Indikator 5	0,320	0,273	VALID
7.	Sanggahan			
	- Indikator 1	0,584	0,273	VALID
	- Indikator 2	0,636	0,273	VALID
	- Indikator 3	0,770	0,273	VALID
	- Indikator 4	0,732	0,273	VALID
	- Indikator 5	0,474	0,273	VALID
	- Indikator 6	0,320	0,273	VALID
8.	Pengendalian Internal			
	- Indikator 1	0,815	0,273	VALID
	- Indikator 2	0,783	0,273	VALID
	- Indikator 3	0,774	0,273	VALID
	- Indikator 4	0,768	0,273	VALID
	- Indikator 5	0,820	0,273	VALID

9.	Pencegahan Fraud			
	- Indikator 1	0,773	0,273	VALID
	- Indikator 2	0,743	0,273	VALID
	- Indikator 3	0,855	0,273	VALID
	- Indikator 4	0,873	0,273	VALID
	- Indikator 5	0,838	0,273	VALID
	- Indikator 6	0,765	0,273	VALID
	- Indikator 7	0,536	0,273	VALID

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4.1 diperoleh bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari $r_{tabel} = 0,273$ (nilai r_{tabel} untuk $n=52$), sehingga semua indikator tersebut adalah valid.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan alat pengukuran konstruk atau variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala/kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Menurut Nunnally dalam Ghozali (2018) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$.

Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas

VARIABEL	<i>Cronbach Alpha</i>	α Standar	STATUS
Perencanaan (X1)	0,788	0,70	Reliabel
Pembentukan Panitia (X2)	0,787	0,70	Reliabel

Tabel berlanjut...

Lanjutan tabel 4.2

Prakualifikasi (X3)	0,751	0,70	Reliabel
Penyusunan Dokumen Lelang (X4)	0,759	0,70	Reliabel
Evaluasi Penawaran (X5)	0,702	0,70	Reliabel
Pengumuman (X6)	0,726	0,70	Reliabel
Sanggahan (X7)	0,738	0,70	Reliabel
Pengendalian Internal (X8)	0,802	0,70	Reliabel
Pencegahan Fraud (Y)	0,787	0,70	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach Alpha* yang cukup besar yaitu diatas 0,70 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan uji *kolmogorov-smirnov (Analisis Explore)* digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data tiap-tiap variabel normal atau tidak (Priyatno, 2013). Dengan kriteria pengukuran sebagai berikut:

Pengambilan keputusan:

1. Jika nilai signifikansi > 0.05 , maka H_0 diterima.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak

Hasil Pengujian normalitas masing-masing variabel ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,91844869
	Absolute	,051
Most Extreme Differences	Positive	,046
	Negative	-,051
Kolmogorov-Smirnov Z		,364
Asymp. Sig. (2-tailed)		,999
	Sig.	,998 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	99% Confidence Interval Lower Bound	,997
	Upper Bound	,999

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai *Test Statistic Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,999 dan signifikan pada 0,998, hal ini berarti H_0 diterima yang berarti data residual terdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolonieritas diantara variable. Cara untuk menentukan apakah terdapat multikolonieritas dalam regresi adalah dengan melihat dari nilai *Tolerance* dan VIF. Apabila nilai *Tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10 maka terjadi multikolinieritas dan apabila nilai *Tolerance* < 0,10 atau nilai VIF > 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Adapun hasil pengujian multikolonieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Multikolonieritas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-10,352	7,808		-1,326	,192		
X1	,462	,101	,516	4,567	,000	,858	1,165
X2	,022	,103	,024	,219	,828	,875	1,143
X3	-,142	,141	-,109	-1,012	,317	,949	1,054
1 X4	,460	,132	,382	3,495	,001	,917	1,091
X5	,286	,188	,166	1,519	,136	,923	1,084
X6	,438	,200	,252	2,195	,034	,834	1,199
X7	,079	,151	,059	,522	,604	,856	1,168
X8	-,048	,159	-,033	-,301	,765	,908	1,102

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4.4 terlihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai *Tolerance* yang lebih kecil dari 0,10, yang berarti bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel bebas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

4.3.3 Uji Heterokedastisitas

Gejala heteroskedastisitas diuji dengan metode Glejser dengan cara menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. Apabila masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual ($\alpha = 0,05$) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Berikut ini hasil dari pengolahan uji heterokedastisitas:

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5,440	4,056		1,341	,187
	X1	-,044	,053	-,123	-,837	,407
	X2	-,028	,053	-,077	-,529	,599
	X3	-,103	,073	-,197	-1,413	,165
	X4	,067	,068	,138	,973	,336
	X5	-,030	,098	-,043	-,303	,763
	X6	-,021	,104	-,030	-,201	,842
	X7	-,130	,079	-,242	-1,648	,107
	X8	,163	,083	,281	1,968	,056

a. Dependent Variable: AbsUi

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Residu (Abs_Ui). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% (nilai signifikan > 0,05). Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heterokedastisitas.

4.4 Uji Ketepatan Model

4.4.1 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama). Hasil perhitungan parameter model regresi berganda diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	487,673	8	60,959	6,034	,000 ^b
	Residual	434,384	43	10,102		
	Total	922,058	51			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X8, X2, X3, X6, X5, X4, X1, X7

Sumber: *Data primer yang diolah, 2020*

Dari uji ANOVA atau uji F didapat nilai F hitung sebesar 6,034 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas $< 0,05$, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pencegahan *fraud* atau dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi dokumen penawaran, tahap pengumuman, tahap sanggahan, serta pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

4.4.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,727 ^a	,529	,441	3,178

a. Predictors: (Constant), X8, X2, X3, X6, X5, X4, X1, X7

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Dari hasil perhitungan komputer program SPSS versi 20 diperoleh $R^2 = 0,441$, hal ini dapat diartikan bahwa 41,1% perubahan atau variasi Y (pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta) dikarenakan oleh adanya perubahan atau variasi variabel X (tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi dokumen penawaran, tahap pengumuman, tahap sanggahan, pengendalian internal). Sedangkan 58,9% sisanya dikarenakan oleh adanya perubahan variabel lain yang tidak masuk dalam model.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-10,352	7,808		-1,326	,192
	X1	,462	,101	,516	4,567	,000
	X2	,022	,103	,024	,219	,828
	X3	-,142	,141	-,109	-1,012	,317

X4	,460	,132	,382	3,495	,001
X5	,286	,188	,166	1,519	,136
X6	,438	,200	,252	2,195	,034
X7	,079	,151	,059	,522	,604
X8	-,048	,159	-,033	-,301	,765

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Dari hasil tersebut apabila ditulis dalam bentuk persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = -10,352 + 0,462X_1 + 0,022X_2 - 0,142X_3 + 0,460X_4 + 0,286X_5 \\ + 0,438X_6 + 0,079X_7 - 0,48X_8$$

Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar -10,352 menyatakan bahwa ada atau tidaknya variabel independen, tingkat pencegahan *fraud* akan menurun sebesar 10,352.
2. Koefisien perencanaan sebesar 0,462 menunjukkan setiap penambahan perencanaan sebesar satu satuan, maka akan diikuti dengan peningkatan pencegahan *fraud* sebesar 0,462.
3. Koefisien pembentukan panitia sebesar 0,022 menunjukkan setiap penambahan pembentukan panitia sebesar satu satuan, maka akan diikuti dengan peningkatan pencegahan *fraud* sebesar 0,022.
4. Koefisien prakualifikasi sebesar -0,142 menunjukkan setiap penambahan prakualifikasi sebesar satu satuan, maka akan diikuti dengan penurunan pencegahan *fraud* sebesar 0,142.

5. Koefisien penyusunan dokumen lelang sebesar 0,460 menunjukkan setiap penambahan penyusunan dokumen lelang sebesar satu satuan, maka akan diikuti dengan peningkatan pencegahan *fraud* sebesar 0,460.
6. Koefisien evaluasi penawaran sebesar 0,286 menunjukkan setiap penambahan evaluasi penawaran sebesar satu satuan, maka akan diikuti dengan peningkatan pencegahan *fraud* sebesar 0,286.
7. Koefisien pengumuman sebesar 0,438 menunjukkan setiap penambahan pengumuman sebesar satu satuan, maka akan diikuti dengan peningkatan pencegahan *fraud* sebesar 0,438.
8. Koefisien sanggahan sebesar 0,079 menunjukkan setiap penambahan perencanaan sebesar satu satuan, maka akan diikuti dengan peningkatan pencegahan *fraud* sebesar 0,079.
9. Koefisien pengendalian internal sebesar -0,048 menunjukkan setiap penambahan pengendalian internal sebesar satu satuan, maka akan diikuti dengan penurunan pencegahan *fraud* sebesar 0,048.

4.6 Uji t

Uji t dimaksud untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi dokumen penawaran, tahap pengumuman, tahap sanggahan, pengendalian internal) secara individu dalam menerangkan variabel dependen (pencegahan *fraud*). Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-10,352	7,808		-1,326	,192
X1	,462	,101	,516	4,567	,000
X2	,022	,103	,024	,219	,828
X3	-,142	,141	-,109	-1,012	,317
1 X4	,460	,132	,382	3,495	,001
X5	,286	,188	,166	1,519	,136
X6	,438	,200	,252	2,195	,034
X7	,079	,151	,059	,522	,604
X8	-,048	,159	-,033	-,301	,765

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data primer yang diolah, 2020

1. Variabel tahap perencanaan

$H_0 : b_1 = 0$: Tahap perencanaan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

$H_0 : b_1 > 0$: Tahap perencanaan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X_1 diperoleh t hitung = 4,567 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hipotesis pertama diterima, maka variabel tahap perencanaan (X_1) memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Y).

2. Variabel tahap pembentukan panitia

$H_0 : b_2 = 0$: Tahap pembentukan panitia tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

$H_0 : b_2 > 0$: Tahap pembentukan panitia berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X_2 diperoleh t hitung = 0,219 dengan tingkat signifikansi 0,828. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga hipotesis kedua ditolak, maka variabel tahap pembentukan panitia (X_2) tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Y).

3. Variabel tahap prakualifikasi

$H_0 : b_3 = 0$: Tahap prakualifikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

$H_0 : b_3 > 0$: Tahap prakualifikasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X_3 diperoleh t hitung = -1,012 dengan tingkat signifikansi 0,317. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga hipotesis ketiga ditolak, maka variabel tahap prakualifikasi (X_3) tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Y).

4. Variabel tahap penyusunan dokumen lelang

$H_0 : b_4 = 0$: Tahap penyusunan dokumen lelang tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

$H_0 : b_4 > 0$: Tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X_4 diperoleh t hitung = 3,495 dengan tingkat signifikansi 0,001. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut kecil besar dari 0,05, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hipotesis keempat diterima, maka variabel tahap penyusunan dokumen lelang (X_4) memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Y).

5. Variabel tahap evaluasi penawaran

$H_0 : b_5 = 0$: Tahap evaluasi penawaran tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

$H_0 : b_5 > 0$: Tahap perencanaan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X_5 diperoleh t hitung = 1,519 dengan tingkat signifikansi 0,136. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga hipotesis kelima ditolak, maka variabel tahap evaluasi penawaran (X_5) tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Y).

6. Variabel tahap pengumuman

$H_0 : b_6 = 0$: Tahap pengumuman tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

$H_0 : b_6 > 0$: Tahap pengumuman berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X_6 diperoleh t hitung = 2,195 dengan tingkat signifikansi 0,034. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hipotesis keenam diterima, maka variabel tahap pengumuman (X_6) memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Y).

7. Variabel tahap sanggahan

$H_0 : b_7 = 0$: Tahap sanggahan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

$H_0 : b_7 > 0$: Tahap sanggahan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X_7 diperoleh t hitung = 0,522 dengan tingkat signifikansi 0,604. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga hipotesis ketujuh ditolak, maka variabel tahap sanggahan (X_7) tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Y).

8. Variabel pengendalian internal

$H_0 : b_8 = 0$: Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

$H_0 : b_8 > 0$: Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X_8 diperoleh t hitung = -0,301 dengan tingkat signifikansi 0,765. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti H_0

diterima dan H_a ditolak. Sehingga hipotesis kedelapan ditolak, maka variabel pengendalian internal (X_8) tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Y).

4.7 Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Pengaruh tahap perencanaan terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta

Hipotesis pertama menyatakan bahwa tahap perencanaan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta. Dari hasil uji t untuk variabel tahap perencanaan diperoleh sebesar 0,000. Hal ini dapat membuktikan bahwa tahap perencanaan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta, karena nilai probabilitas $0,000 < 0,05$.

Hal ini disebabkan karena persiapan terhadap mutu sudah baik, transparansi dalam penyusunan spesifikasi teknis dan kriteria untuk membentuk pengadaan barang dan jasa sudah jelas, jadwal waktu pengadaan barang dan jasa sudah tepat, dan pembagian serta pengaturan paket menjadi beberapa proyek pengadaan sudah jelas. Dengan adanya mutu yang baik dalam perencanaan serta transparansi dalam penyusunan spesifikasi teknis dan kriteria dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa akan dapat mengurangi adanya kecurangan. Jadwal waktu yang tepat dan pengaturan paket dalam proyek pengadaan akan memudahkan pihak terkait dalam mengawasi kegiatan pengadaan barang dan jasa elektronik.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faisol dkk (2014), Messah dkk (2013), dan Artantri (2016) yang menyatakan bahwa terdapat

pengaruh langsung antara tahap perencanaan terhadap pencegahan *procurement fraud*.

2. Pengaruh tahap pembentukan panitia terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta

Hipotesis kedua menyatakan bahwa tahap pembentukan panitia berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta. Dari hasil uji t untuk variabel tahap pembentukan panitia diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,828. Hasil ini membuktikan bahwa tahap pembentukan panitia tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta, karena nilai probabilitas $0,828 > 0,05$.

Hasil penelitian tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Hal ini sebabkan karena dalam tahap pembentukan panitia diperlukan adanya prinsip atau sikap yang mampu membentuk karakter ataupun kepribadian seseorang, seperti prinsip profesionalisme, prinsip response, prinsip akuntabel, prinsip kredibel, dan prinsip mandiri masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan nilai untuk seluruh indikator hanya berada pada kategori cukup, artinya pegawai masih kurang efektif dalam menjalankan prinsip-prinsip dalam tahapan pembentukan panitia. Apabila prinsip-prinsip tersebut dijalankan dengan baik maka akan membentuk kepribadian pegawai yang baik pula sehingga akan mampu mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faisol dkk (2014), Oktaviani (2017), Khairani (2017) dimana tahap pembentukan panitia

pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement* tidak dapat mengurangi tindakan *fraud*.

3. Pengaruh tahap prakualifikasi terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa tahap prakualifikasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta. Dari hasil uji t untuk variabel tahap prakualifikasi diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,317. Hasil ini membuktikan bahwa tahap prakualifikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta, karena nilai probabilitas $0,317 > 0,05$.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan, yang menyatakan bahwa tahap prakualifikasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintah Kota Surakarta. Hal ini terjadi karena dalam tahap prakualifikasi, syarat administrasi, syarat teknis, pengalaman perusahaan, dan kemampuan perusahaan melakukan lelang perlu masih kurang, karena dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik diperlukan ketaatan dan kelengkapan berkas yang baik sehingga jika seluruh berkas yang dipergunakan sebagai persyaratan dalam pengadaan barang dan jasa telah terpenuhi, maka akan sulit dalam melakukan tindak kecurangan. Apabila seluruh kegiatan telah terpenuhi dengan maksimal, maka dengan sendirinya akan mampu mencegah terjadinya *fraud*. Kemampuan dan pengalaman sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya *fraud*, karena dengan adanya kemampuan dan pengalaman maka kecuranganpun dapat dicegah.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Faisol dkk (2014), Oktaviani (2017), Khairani (2017) yang mengemukakan bahwa tahap prakualifikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

4. Pengaruh tahap penyusunan dokumen lelang terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta

Hipotesis keempat menyatakan bahwa tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta. Dari uji t untuk variabel tahap penyusunan dokumen lelang diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,001. Hasil ini membuktikan bahwa tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta, karena nilai probabilitas = $0,001 < 0,005$.

Dalam tahap penyusunan dokumen lelang, responden sudah menyusun dokumen secara sederhana dan transparan dalam penyampaian data pengadaan barang dan jasa. Kesederhanaan dokumen akan membuat isi dokumen itu lebih mudah untuk dipahami sehingga akan sulit untuk dilakukan kecurangan. Begitu juga dengan transparansi dalam menyampaikan data tentang pengadaan barang dan jasa transparansi sangat dibutuhkan dalam menunjang terjadinya kecurangan, semakin besar transparansi maka akan semakin sulit dilakukan kecurangan.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Faisol dkk (2014), Messah dkk (2013), Artantri dkk (2016) dimana hasil penelitian menyatakan bahwa tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

5. Pengaruh tahap evaluasi penawaran terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta

Hipotesis kelima menyatakan bahwa tahap evaluasi penawaran berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta. Dari hasil uji t untuk variabel tahap evaluasi penawaran diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,136 Hasil ini membuktikan bahwa tahap evaluasi penawaran tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta, karena nilai probabilitas = $0,136 > 0,05$.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan, yang menyatakan bahwa tahap evaluasi penawaran berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini karena evaluasi administrasi yang mempertimbangkan keabsahan, jamina penawaran dan aritmatika belum dilakukan dengan baik, terbukti dengan nilai indikator yang berada pada kategori cukup. Artinya pegawai masih kurang efektif dalam menjalankan evaluasi administratif. Keabsahan suatu dokumen merupakan salah satu dokumen yang harus diawasi semaksimal mungkin, karena apabila terdapat salah satu dokumen yang belum absah, akan terindikasi sebagai dokumen palsu sehingga akan mampu menciptakan suatu kecurangan.

enelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Faisol dkk (2014), Oktaviani (2017), Messah dkk (2013), dimana tahap evaluasi penawaran tidak sepenuhnya mampu mencegah terjadinya *fraud*.

6. Pengaruh tahap pengumuman terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta

Hipotesis keenam menyatakan bahwa tahap pengumuman berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta. Hasil pengukuran memberikan hasil uji t sebesar 0,034. Tahap pengumuman lelang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta, karena nilai probabilitas = $0,034 < 0,05$.

Dalam tahap pengumuman instansi harus mampu meningkatkan keterjangkauan pengumuman oleh masyarakat. Pada Kota Surakarta pengumuman dilakukan secara tepat waktu, hal ini dapat dibuktikan dari website LPSE yang dapat diakses di <https://lpse.surakarta.go.id> yang berisi pengumuman yang selalu *update*. Kejelasan terhadap proses pelelangan akan menjadi salah satu komponen yang mampu mencegah terjadinya *fraud*.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Messah dkk (2013), Artantri dkk (2016), Oktaviani (2017) yang menyatakan bahwa tahap pengumuman tidak dapat mencegah terjadinya *fraud*.

7. Pengaruh tahap sanggahan terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta

Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa tahap sanggahan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta. Dari hasil uji t untuk variabel tahap sanggahan diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,604. Hasil ini membuktikan bahwa tahap sanggahan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta, karena nilai probabilitas = $0,604 > 0,05$.

Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, yang menyatakan bahwa tahap sanggahan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah

Kota Surakarta. Dalam tahap sanggahan, instansi harus lebih subyektif dalam mencermati setiap publikasi sanggahan dan tanggapan, investigasi untuk membuktikan kebenaran sanggahan dan saksi administratif yaitu pembatalan tender, mencoret nama pemenang, dan pembubaran panitia jika sanggahan tidak benar.

Publikasi setiap sanggahan maupun tanggapan akan memperlihatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa sehingga dapat mengurangi terjadinya *fraud*. Investigasi menyeluruh terhadap pembuktian kebenaran akan mampu mengindikasi adanya kecurangan. Pemberian sanksi diharapkan dapat memberi efek jera bagi peserta maupun panitia sehingga tidak terjadi kecurangan lagi di masa yang akan datang.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faisol dkk (2014), Oktaviani (2017), Messah dkk (2013) yang menyatakan bahwa tahap sanggahan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

8. Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta

Hipotesis kedelapan menyatakan pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta. Dari hasil uji t untuk variabel pengendalian internal diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,765. Hasil ini membuktikan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta, karena nilai probabilitas = $0,765 < 0,05$.

Hasil pengujian ini tidak relevan dengan hipotesis yang diajukan, yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta. Pengendalian internal diterapkan dalam organisasi guna memberikan kepastian terhadap pencapaian tujuan organisasi. Tata kelola pemerintah yang baik dilakukan dengan menetapkan sistem pengendalian internal dalam setiap aktifitas organisasi dan dapat berjalan dengan efektif jika struktur pengendalian internal dirancang untuk diterapkan secara baik dalam lingkungan organisasi.

Pengendalian internal tidak hanya diterapkan oleh perusahaan yang mendapatkan tender, tetapi juga harus diterapkan pada badan atau lembaga yang bertanggungjawab pada proses pengadaan. Apabila perusahaan melakukan kecurangan dan panitia mengetahui tetapi diam saja, artinya pengendalian internal pada lembaga lemah sehingga kecurangan tidak dapat dicegah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh R D Pathak et al (2008), Soleman (2013), Huda dkk (2018), Hidayati, Mulyadi (2017) yang membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

BAB V **PENUTUP**

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta
2. Tahap pembentukan panitia tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta
3. Tahap prakualifikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta
4. Tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta
5. Tahap evaluasi penawaran tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta
6. Tahap pengumuman berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta
7. Tahap sanggahan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta
8. Tahap pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah responden yang berjumlah 52 orang dan metode yang digunakan menggunakan kuisioner saja, belum bisa menggunakan metode wawancara terstruktur.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran sabagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen yang bervariasi sehingga penelitian lebih relevan dan mendekati fenomena yang sesungguhnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah metode yang digunakan tidak hanya kuisioner tetapi bisa dengan yang lain seperti metode wawancara terstruktur.
3. Diharapkan dapat mengganti objek penelitian seperti di Pemerintah Daerah Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, atau didaerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfah, Eka Arianty. 2011. Pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan implikasinya pada kinerja keuangan. *Jurnal Investasi*, Vol. 7, No. 2.
- Artantri, Artantri dkk Putu Resti Mega, Lilik Handajani, dan Endar Pituringsih. 2016. Peran *e-procurement* terhadap pencegahan fraud pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah di pulau lombok. *Jurnal Universitas Trunojoyo*. Volume 10, No. 1, Juni 2016.
- Faisol dkk, Imam Agus, Tarjo, dan Siti Musyarofah. 2014. Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud di Sektor Publik. *JAFFA*. Vol. 02 No. 2 Oktober 2014 Hal. 71-90.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2008. *Structural Equation Modeling Metode Alternative dengan Partial Least Square Edisi 2*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hidayati, Nur, J.M.V Mulyadi. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* Vol. 4, No. 2, Desember 2017, Hal. 275-294.
- Huda Nurul, Dadang Sadeli, Hermiyetti. 2018. Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Citra Widya Edukasi*, Vol 10, No. 3, 2018.
- Husodo, Adnan. 2010. Mencegah Korupsi di Bidang Pengadaan Barang & Jasa Instansi Pemerintah. *Artikel dari Fakultas Hukum UI*.
- Khairani, Sharira. 2017. Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Procurement di Sektor Publik (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi). *Artiket Ilmiah Universitas Negeri Padang*.
- Lintangsari, Hapsari, Budiono. 2017. Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten). *e-Proceeding of Management : Vol.4, No.3 Desember 2017*.

- Messah dkk, Yunita A. Maria Y.Y. Asmat, H. A. Rizal. 2013. Kajian Persepsi Pelaku Jasa Konstruksi tentang Kegiatan Pengadaan Jasa Kontruksi secara E-procurement di Kota Kupang. *Jurnal Teknik Sipil, Vo. II. No. 1 April 2013*.
- Naupene A, Soar J, Vaidya K, Yong J. 2014. Willingness to adopt e-procurement to reduce corruption: Result of the PLS parth modeling. *Transforming Government: People, Process dan Policy, Vol. 8 Iss 4 pp. 500-520*.
- Nugroho, Wanto, Trisnawati. 2015. Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No.11, Hal. 1905-1911*.
- Nurharjanti, Nashirotn N. 2017. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi dan Investigasi, Vol. 18 No. 2, Hal. 209-221, Juli 2017*.
- Oeyoen, J & Yulianto, H. 2011. Standar Transparasi APEC untuk Pengadaan di Indonesia. *Transparency international-USA dan Center for International Private Enterprise*.
- Oktaviani, Lisa. 2017. Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan dan Pendeteksi Fraud di Sektor Publik (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Pesisir Selatan. *Artikel Ilmiah Universitas Negeri Padang*.
- Pathak, R., Singh, G., Belwal, R., Naz, R. And Smith, R. 2008. E-governance, corruption and public service delivery: a comparative study of Fiji and Ethiopia. *Journal of Administrative and Governance, Vol. 3 No. 1 pp. 65-79*.
- Perpres No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Purwanto, SS. 2008. Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Kontruksi Secara E-Procurement. *Jurnal Teknik Sipil Vol. 9 No. 1 Hal. 43-56, Oktober 2015*.
- Soleman, Rusman. 2013. Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. *Indonesian Journal of Accounting and Auditing Vol. 17 No. 1, Juni 2013: 57-74*.

- Suroso. 2011. Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Dalam Perusahaan oleh Internal Auditor. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik Program Akuntansi FE UNPAB Medan Vol. 2 No. 1 Juni 2011*.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tuanakotta, Theodorus M. 2016. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Udoyono, Kodar. 2012. E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan. Volume 3 Nomor 1 Februari 2012*.
- Vaidya, et al. 2006. Critical Factors That Influence E-Procurement Implementation Success In The Public Sector. *Journal Of Public Procurement, Volume 6, Issues 1&3, 70-99*.
- Wibawa, Dwi A. 2014. *Apakah E-Procurement Di Kementerian Keuangan Menjadikan Pengadaan Barang Dan Jasa Lebih Transparan?*. Artikel Anggaran dan Perbendaharaan. Pusdiklat AP.
- Widiyarta, Herawati, Atmadja. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparature, Budaya Organisasi, Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng). *E-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol 8, No. 2, 2017*.
- Witanto. 2012. *Dimensi kerugian negara dalam hubungan kontraktual (suatu tinjauan terhadap risiko kontrak dalam proyek pengadaan barang/jasa instansi pemerintah*. Bandung: CV. Mandar Jaya

<https://acch.kpk.go.id/>

<https://www.kpk.go.id/>

www.LKPP.go.id

www.solopos.com

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Penelitian

NO	BULAN	Juli				Agustus				Februari				Maret				April				Mei			
	KEGIATAN	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X																					
2	Konsultasi			X																					
3	Revisi Proposal				X																				
4	Seminar Proposal				X																				
5	Pengumpulan Data					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
6	Analisis Data																	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																								
8	Pendaftaran Munasqosah																								
9	Munasqosah																								
10	Revisi Skripsi																								
NO	BULAN	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November			
	KEGIATAN	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																								
2	Konsultasi																								
3	Revisi Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Pengumpulan Data																								
6	Analisis Data	X	X																						
7	Penulisan Akhir Naskah Skripsi			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
8	Pendaftaran Munasqosah																			X					
9	Munasqosah																				X				
10	Revisi Skripsi																					X	X		

Lampiran 2. Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER PENELITIAN

Hal: Permohonan Pengisian Kuisisioner

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Saudara/i

Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubung dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, saya:

Nama : Dessy Saptarini
NIM : 155121106
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Surakarta”. Penelitian ini diharapkan banyak memberikan hasil yang bermanfaat. **Kuisisioner ini hanya untuk kepentingan skripsi tidak untuk dipublikasikan secara meluas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga.**

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuisisioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan untuk kepentingan lain.

Hormat Saya

Dessy Saptarini

A. Pertanyaan Umum

Isilah pada tempat yang telah disediakan dengan singkat dan jelas. Jika bapak/ibu keberatan untuk mencantumkan nama, maka pertanyaan nomor 1 boleh dikosongkan.

1. Nama :
2. Pendidikan terakhir :
3. Jabatan :
4. Masa Jabatan :

B. Pertanyaan Khusus

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pertanyaan- pertanyaan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan cara diceklis (√).
2. Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Skor jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati.
3. Pengisian hanya memilih salah satu alternatif jawaban yang ada sesuai dengan pernyataan, Skor jawaban adalah sebagai berikut:
Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
Skor 2 : Tidak Setuju (TS)
Skor 3 : Netral (N)
Skor 4 : Setuju (S)
Skor 5 : Sangat Setuju (SS)
4. Mohon Bapak/ibu mengisi kuesioner ini sesuai dengan yang selama ini bapak/ibu alami.

<i>E-Procurement</i>						
No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
A	Tahap perencanaan					
1	Penyusunan spesifikasi kriteria dilakukan secara realistis sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.					
2	Persiapan target, waktu, mutu, dan biaya pengadaan telah dilakukan dengan transparan dan akuntabel.					
3	Penyusunan spesifikasi teknis telah dilakukan dengan transparan untuk membentuk pengadaan yang multi produk dan banyak pilihan.					
4	Menentukan waktu pada tahap pengadaan telah berdasarkan kebutuhan waktu pada masing-masing aktifitas.					
5	Kegiatan pembagian dan pengaturan paket lelang telah berlangsung efisien dan efektifitas.					
6	Spesifikasi teknis dan kriteria telah dikaji ulang melalui pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat.					
7	Aktivitas pengadaan telah dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas.					
B	Tahap Pembentukan Panitia					
1	Panitia pengadaan telah bersikap transparan dan responsif menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan.					
2	Panitia pengadaan telah mengimplementasikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa secara mandiri.					
3	Panitia pengadaan telah independen dan bebas dari intervensi pimpinan atau atasan					
4	Panitia telah menyusun dokumen tender dengan transparan dan akuntabel.					
5	Panitia menyeleksi peserta tender dengan berlandaskan sikap profesional.					
6	Kemampuan teknis panitia pengadaan saat ini semakin profesional dan akuntabel.					
7	Panitia lelang telah profesional dan berpengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa.					
C	Tahap Prakualifikasi					
1	Seleksi dokumen administratif telah dilaksanakan dengan transparan.					
2	Penentuan syarat teknis telah dilaksanakan dengan transparan.					

3	Dokumen administratif prakualifikasi telah tercantum pengesahan dari pihak yang berwenang.					
4	Pengalaman perusahaan telah menjadi pertimbangan pada tahap prakualifikasi.					
5	Pengalaman perusahaan telah didukung oleh dokumen sertifikasi asli.					
6	Monitoring dan pemeriksaan terhadap kondisi atau kemampuan perusahaan secara langsung telah dijalankan.					
D	Tahap Penyusunan Dokumen Lelang					
1	Dokumen lelang yang dibuat telah mengikuti kaidah atau peraturan yang berlaku.					
2	Dokumen lelang sebelum disebarluaskan telah dibuat transparan.					
3	Dokumen lelang telah dikaji ulang oleh pihak-pihak terkait sebelum disebarluaskan.					
4	Dokumen lelang telah disusun secara sederhana.					
5	Dokumen Lelang telah disusun berdasarkan lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran, jenis, waktu pelaksanaan, dan metode kerja.					
6	Perusahaan konten dalam dokumen lelang langsung diumumkan atau disampaikan pada pihak yang terkait.					
7	Penentuan dokumen berupa syarat kontrak dan syarat teknis telah dilakukan secara transparan.					
E	Tahap Evaluasi Penawaran					
1	Evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga telah dilakukan dengan prinsip keterbukaan.					
2	Evaluasi administrasi telah mempertimbangkan faktor redaksional, keabsahan, jaminan penawaran dan aritmatik.					
3	Evaluasi teknis telah mempertimbangkan dokumen sertifikasi dari lembaga akreditasi yang kredibel.					
4	Evaluasi harga telah menitikberatkan pada kesesuaian penawaran dengan kriteria yang diisyaratkan panitia.					
5	Penyusunan kriteria evaluasi penawaran telah melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.					
6	Evaluasi penawaran telah dilakukan dengan transparan.					
F	Tahap Pengumuman					
1	Pengumuman lelang telah dilakukan dengan rinci dan jelas.					
2	Pelaksanaan pengumuman telah dilaksanakan dengan waktu yang cukup, tepat waktu dan tidak ditunda-tunda.					
3	Pengumuman telah dilakukan dengan terbuka.					

4	Pengumuman telah dilakukan dengan jangkauan yang luas.					
5	Semua langkah pengadaan dilaksanakan dengan terbuka untuk semua mitra kerja.					
G	Tahap Sanggahan					
1	Saat ini, panitia sudah terbuka dan akomodatif serta telah memproses setiap sanggahan.					
2	Semua aktifitas sanggahan dan tanggapan telah dipublikasikan melalui <i>e-procurement</i> .					
3	Selama ini, jika sanggahan tersebut benar maka akan dilakukan pembatalan tender dan mencoret nama pemenang.					
4	Saat ini, panitia telah melakukan investigasi untuk membuktikan kebenaran setiap sanggahan.					
5	Selama ini, proses aktivitas sanggahan telah dilakukan dengan cara yang transparan.					
6	Selama ini, seluruh aktivitas sanggahan yang masuk, telah dipublikasikan secara transparan melalui <i>website</i> .					

Pengendalian Internal						
No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Pimpinan melakukan sosialisasi kepada karyawan perihal nilai-nilai entitas yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh karyawan.					
2	Perusahaan menyelenggarakan pengendalian yang memadai untuk mengatasi risiko dalam menagih piutang usaha.					
3	Adanya pemisahan tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan aktiva dan karyawan yang menangani langsung aktiva secara fisik (operasional).					
4	Transaksi yang terjadi dalam perusahaan dikelola dengan komputerisasi.					
5	Melakukan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkesinambungan (berkala) oleh manajemen.					

Pencegahan <i>fraud procurement</i>						
No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Selama ini, pemerintah telah menerapkan SOP/peraturan seperti petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa.					
2	Saat ini, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> untuk panitia pengadaan telah dikembangkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.					
3	Selama ini, monitoring pelaksanaan tugas panitia telah diperketat dan dilaksanakan secara rutin.					

4	Saat ini, monitoring dan pemeriksaan terhadap kondisi perusahaan secara langsung telah diperketat dan dijalankan.					
5	Selama ini, pemerintah telah menerapkan nilai etika dan integritas terhadap panitia pengadaan.					
6	Saat ini, telah diterapkan standart pengendalian untuk menjamin terciptanya pengadaan yang transparan dan profesional.					
7	Sistem <i>e-procurement</i> dapat mencegah terjadinya kecurangan pengadaan barang dan jasa.					

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Telp&Faks. (0271) 655 277
 Website: <http://bappeda.surakarta.go.id> E-mail: bappeda@surakarta.go.id
 SURAKARTA
 57111

Nomor : 070/0228/II/2020
 Perihal : Izin Penelitian

Dasar : Surat Izin Rekomendasi Dari Instansi Pemohon
 Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor 070/265 Perihal Penyederhanaan Prosedur Permohonan Riset, KKN, PKL di Jawa Tengah

Dijinkan Kepada :

Nama	: Dessy Saptarini
No Identitas	: 3311094606970005
Alamat	: Plosokuning Rt 03/04 , GROGOL, SUKOHARJO
Asal Instansi	: IAIN Surakarta
Alamat Instansi	: Jl. Pandawa Pucangan PUCANGAN, KARTASURA, SUKOHARJO
Keperluan	: Melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem E-Procurement dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud pada Pemerintah Kota Surakarta"
Lokasi	: 1. Kota Surakarta
Penanggung Jawab	: Ade Setiawan. M. Ak
Waktu	: 03 Februari 2020 - 31 Oktober 2020

Surakarta, 05 Februari 2020
 a.n Kepala Badan Perencanaan,
 Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Kasubid Kreativitas Inovasi dan
 Penelitian

a.n Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kasubid Hubungan Antar Lembaga




(MOH. RUDIYANTO, S.Sos, M.Si)
 NIP : 19760506 199703 1 004



(BUDI WINARNO, SH)
 NIP : 19710320 199903 1 003

NO	PERENCARAAN							SKORE	PEMBENTUKAN PANITIA							SKORE	PRAKUALIFIKASI							SKORE	PENYUSUNAN DOKUMEN							SKORE	EVALUASI PENAWARAN						SKORE
	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O1		O2	O3	O4	O5	O6	O7	O1		O2	O3	O4	O5	O6		
1	4	4	4	5	5	3	4	29	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	3	5	5	3	26	4	4	5	5	5	5	33	3	2	3	4	3	2	17		
2	5	5	5	5	5	5	5	35	4	3	4	4	3	4	4	26	5	5	3	4	4	4	25	3	3	4	4	3	3	3	23	4	3	3	2	4	4	20	
3	3	3	3	4	3	2	2	20	5	5	3	5	4	4	4	30	5	5	4	5	5	4	28	4	3	5	5	3	4	5	29	3	4	2	2	4	4	19	
4	5	5	4	4	4	4	3	29	3	4	4	4	3	3	3	24	2	3	2	5	4	2	18	5	4	4	3	3	2	3	24	4	3	2	1	3	3	16	
5	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	5	5	3	4	5	30	3	3	2	5	5	3	21	4	4	5	5	5	5	33	4	4	3	3	5	5	24		
6	4	3	3	3	3	4	4	24	4	3	3	3	4	3	4	24	5	5	5	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	28	4	3	3	3	3	3	19		
7	4	4	4	4	4	5	5	30	4	5	5	5	4	5	4	32	4	4	4	4	4	3	23	3	3	4	5	3	3	3	24	4	3	4	4	5	5	25	
8	3	3	2	1	2	2	2	15	3	3	3	3	3	3	3	21	2	4	2	3	3	3	17	3	3	4	3	2	2	2	19	4	3	4	4	3	3	21	
9	3	3	3	3	3	3	3	21	5	4	4	4	4	5	5	31	5	5	3	4	4	4	25	4	4	4	4	4	4	28	5	4	5	4	3	4	25		
10	4	4	4	4	4	4	4	28	5	5	4	4	4	4	4	30	4	4	4	4	4	5	25	2	3	4	4	4	3	2	22	5	4	5	3	3	4	24	
11	4	4	5	5	5	5	5	33	4	5	4	5	5	4	4	31	4	4	5	5	5	28	5	5	4	4	3	4	30	5	4	3	5	5	5	27			
12	5	5	5	5	3	4	4	31	4	4	4	5	4	5	5	31	3	3	4	5	5	3	23	4	3	4	5	5	5	31	2	2	3	3	5	5	20		
13	4	4	2	3	3	3	4	23	3	3	3	4	3	4	3	23	5	5	3	5	5	3	26	5	5	4	5	4	4	31	3	3	4	3	4	4	21		
14	4	3	2	4	3	3	2	21	4	4	5	4	3	3	3	26	5	5	3	5	5	2	25	4	4	5	4	5	5	3	30	2	3	4	3	5	5	22	
15	5	4	5	5	3	4	5	31	3	3	4	4	2	2	3	21	4	4	4	4	4	3	23	4	5	4	4	4	4	29	2	2	3	3	5	5	20		
16	2	3	3	4	4	3	2	21	4	3	5	5	3	5	4	29	4	4	4	5	5	4	26	5	4	5	5	5	4	4	32	3	3	4	3	5	5	23	
17	4	5	4	4	4	5	5	31	3	3	4	5	3	2	3	23	5	5	3	5	5	2	25	2	1	4	4	3	3	3	20	4	4	3	4	5	5	25	
18	5	5	5	4	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	28	3	4	4	4	4	3	22	3	2	5	4	5	4	27	5	3	4	4	4	4	24		
19	3	3	3	3	3	3	2	20	4	3	5	5	5	4	4	29	3	4	5	3	4	4	22	4	4	4	3	3	3	25	4	4	3	4	3	3	21		
20	5	4	3	3	4	4	4	27	2	3	4	4	3	3	2	21	3	4	2	3	4	5	21	5	4	3	4	3	4	3	26	4	3	4	4	3	3	21	
21	5	5	4	4	4	5	5	32	4	5	5	5	4	4	4	31	5	5	3	5	5	3	26	4	4	4	3	3	4	25	4	4	3	3	4	4	22		
22	4	4	5	5	4	4	4	30	4	4	5	5	5	5	5	33	3	4	4	3	4	3	21	4	3	5	5	5	3	30	5	3	4	4	4	4	24		
23	4	3	4	3	3	5	5	27	3	3	5	5	5	3	4	28	3	4	4	3	4	2	20	4	3	4	3	3	3	23	3	3	4	3	4	4	21		
24	4	4	5	5	5	5	5	33	4	4	5	4	5	5	31	3	3	3	3	3	3	19	5	5	5	5	3	4	4	31	4	4	4	5	4	4	25		
25	2	3	2	2	2	3	4	18	2	2	3	3	3	1	3	17	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	3	3	3	24	5	3	4	3	4	4	23		
26	3	3	4	4	4	4	4	26	3	4	4	4	3	4	3	25	3	5	5	3	5	3	24	4	4	3	4	4	4	27	4	3	4	5	5	3	24		
27	4	3	3	4	2	3	4	23	4	4	4	4	4	4	4	28	3	5	3	5	3	3	24	4	4	3	4	4	4	27	4	4	4	5	4	5	26		
28	2	2	3	3	2	2	3	17	3	3	4	4	3	4	4	25	3	2	3	3	2	2	15	4	5	5	5	4	4	31	4	3	5	5	4	4	25		
29	3	4	5	5	2	5	5	29	3	3	3	4	4	4	4	25	4	5	3	4	5	3	24	5	5	3	3	5	4	29	5	4	5	3	4	4	25		
30	3	4	4	4	4	5	5	29	5	4	5	4	4	4	4	30	4	5	4	4	5	2	24	3	3	4	4	3	3	23	5	4	5	3	4	3	24		
31	5	5	5	4	4	3	3	29	5	5	5	5	4	4	4	32	3	3	4	3	3	3	19	3	3	4	4	4	4	26	3	4	5	4	4	4	24		
32	5	5	3	4	4	4	4	29	4	4	4	2	3	2	2	21	4	4	4	4	4	4	24	4	4	5	5	5	4	33	4	5	3	3	4	4	23		
33	4	3	4	4	3	3	4	25	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	5	3	3	3	20	5	5	4	3	3	3	26	5	5	3	5	3	3	24		
34	4	4	4	4	4	4	4	28	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	2	3	3	4	18	4	4	4	4	4	4	28	3	5	3	4	4	4	23		
35	3	3	3	3	4	4	4	24	4	3	3	3	4	4	4	25	4	4	2	4	4	5	23	4	3	3	4	4	4	26	3	5	3	3	3	4	21		
36	5	5	3	5	4	5	4	31	5	4	4	3	4	3	3	26	5	5	3	5	5	4	27	3	3	3	4	4	4	25	4	4	3	2	2	2	18		
37	3	4	4	4	4	5	3	27	5	5	5	5	5	5	35	3	4	2	3	4	3	19	3	3	3	3	3	3	21	5	3	5	4	4	4	25			
38	3	3	3	3	3	3	3	21	5	5	4	4	4	4	4	30	5	5	3	5	5	4	27	5	3	3	4	4	4	27	3	3	5	5	4	4	24		
39	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	5	5	5	5	32	4	4	3	4	4	5	24	4	4	4	4	4	4	28	5	4	5	4	4	4	26		
40	3	3	4	4	3	5	5	27	3	4	4	4	3	3	3	24	3	3	3	3	3	3	18	4	4	3	3	4	3	24	3	3	5	3	2	2	21		
41	4	4	4	5	5	5	4	31	3	3	3	4	4	4	4	25	4	4	5	4	4	4	25	4	3	4	3	3	3	23	5	3	3	4	4	4	23		
42	5	3	4	3	4	3	5	27	5	5	5	5	5	5	35	3	3	5	3	3	4	21	5	4	4	3	4	5	30	3	3	3	4	4	4	21			
43	4	4	4	4	4	4	4	28	3	3	3	4	2	1	2	18	4	5	3	4	5	4	25	3	4	4	4	5	5	30	5	3	4	4	3	4	23		
44	2	2	2	3	3	2	4	18	3	4	5	5	4	3	3	27	4	4	3	4	4	4	23	3	3	3	4	5	4	26	5	3	3	2	3	3	19		
45	4	3	3	4	4	3	3	24	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	24	5	4	5	5	4	4	31	5	3	3	2	4	4	21		
46	4	4	4	4	4	4	4	28	1	2	2	3	2	3	3	16	4	5	5	4	5	4	27	4	4	4	5	3	4	28	5	3	4	4	3	1	20		
47	5	5	5	5	5	5	5	35	5	4	4	4	4	4	4	29	3	3	3	3	3	5	20	4	4	4	3	3	4	26	5	3	4	3	5	3	23		
48	4	3	3	4	5	3	5	27	3	3	4	4	3	3	3	23	3	3	3	3	3	5	20	4	4	4	3	3	4	26	5	3	4	3	4	3	22		
49	4	4	3	3	3	3	3	23	3	3	4	4	4	4	4	26	4	3	4	4	3	5	23	5	4	3	2	3	3	23	4	3	4	1	3	4	19		
50	4	4	4	4	5	5	5	31	5	3	2	2	3	3	3	21	5	5	5	5	5	30	3	3	3	4	3	3	22	4	4	3	3	4	4	22			

NO	PENGUMUMAN						SANGGAHAN						PENGENDALIAN INTERNAL					PENCEGAHAN FRAUD									
	O1	O2	O3	O4	O5	SKORE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	SKORE	O1	O2	O3	O4	O5	SKORE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	SKORE
1	5	5	4	4	4	22	5	4	3	4	4	4	24	4	4	5	4	4	21	5	4	5	5	5	5	5	34
2	4	4	4	4	5	21	4	4	2	2	3	4	19	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	5	5	5	31
3	5	5	4	4	4	22	5	3	5	5	4	4	26	4	5	5	5	5	24	5	1	5	3	5	5	3	27
4	4	3	5	3	4	19	5	4	5	5	3	4	26	3	3	4	5	5	20	4	4	3	4	4	3	3	25
5	5	5	4	4	5	23	5	4	3	3	4	4	23	4	3	4	4	4	19	5	5	5	5	5	4	5	34
6	5	5	4	3	5	22	5	4	3	4	5	4	25	5	5	4	4	4	22	3	2	3	3	3	4	4	22
7	4	5	3	5	5	22	4	4	3	4	4	4	23	3	4	4	4	4	19	4	3	4	4	5	5	5	30
8	4	3	4	4	5	20	5	5	4	4	3	4	25	4	3	4	4	4	19	3	1	2	2	3	3	3	17
9	4	3	4	3	5	19	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	3	3	4	25
10	4	3	4	4	3	18	3	4	4	4	4	4	23	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	3	3	4	25
11	5	5	5	4	3	22	4	4	5	5	3	4	25	4	3	5	5	5	22	5	5	5	5	5	5	5	35
12	5	5	5	5	4	24	3	5	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	5	5	35
13	4	4	4	5	4	21	4	3	3	3	3	3	19	3	3	3	3	3	15	4	3	3	3	4	4	4	25
14	5	5	3	4	4	21	4	3	2	3	5	5	22	3	3	4	4	4	18	5	3	4	4	3	3	3	25
15	4	4	2	4	4	18	4	3	4	4	4	3	22	4	2	4	4	4	18	4	3	3	3	3	4	4	24
16	5	5	3	4	4	21	4	4	4	2	3	3	20	3	3	3	3	3	15	5	4	5	5	5	5	5	34
17	5	5	4	5	5	24	5	2	2	2	4	3	18	3	4	3	3	3	16	4	4	4	4	4	4	5	29
18	4	4	3	3	4	18	5	5	4	4	4	4	26	4	2	4	4	5	19	5	4	4	4	5	5	5	32
19	4	4	2	5	5	20	4	5	4	4	4	3	24	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	4	4	2	26
20	3	3	3	4	4	17	5	4	3	3	3	2	20	2	2	3	4	4	15	4	4	4	4	4	4	3	27
21	4	4	4	5	3	20	4	4	3	3	4	3	21	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	4	4	4	28
22	4	4	3	4	4	19	2	4	3	3	3	2	17	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	5	5	35
23	5	5	3	5	3	21	5	3	3	3	3	3	20	4	4	2	3	3	16	4	4	4	4	4	4	4	28
24	4	4	3	4	3	18	5	3	3	3	3	2	19	4	4	4	4	4	20	5	5	5	4	4	4	3	30
25	5	5	3	3	3	19	3	4	3	3	4	3	20	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	5	3	28
26	4	4	3	4	3	18	5	4	5	3	3	3	23	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	4	4	5	28
27	4	4	3	3	3	17	3	3	3	3	4	4	20	5	5	5	5	5	25	3	2	3	3	4	3	3	21
28	5	5	3	5	3	21	5	4	3	4	3	5	24	5	5	5	5	5	25	4	5	5	4	4	4	3	29
29	3	2	3	4	3	15	4	3	2	2	3	5	19	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	3	4	26
30	4	4	4	3	4	19	3	5	4	4	5	3	24	3	3	4	4	4	18	4	4	4	4	3	3	4	26
31	5	5	4	5	4	23	3	5	3	3	4	3	21	4	4	4	5	5	22	4	4	3	4	4	4	4	27
32	4	4	5	4	4	21	5	5	4	4	3	4	25	4	4	4	4	4	20	4	4	5	5	5	5	3	31
33	4	5	5	4	5	23	3	3	3	4	4	3	20	4	4	4	4	3	19	4	4	5	5	5	5	4	32
34	5	5	3	3	4	20	5	2	3	4	3	4	21	5	5	4	5	5	24	4	4	5	5	5	5	5	33
35	5	5	3	3	5	21	4	2	3	4	3	5	21	5	5	4	4	5	23	3	3	3	3	3	3	5	23
36	3	2	4	3	5	17	5	3	4	4	3	4	23	4	4	3	3	3	17	3	3	4	4	4	4	4	26
37	3	4	4	5	4	20	5	3	4	4	3	3	22	4	4	3	3	4	18	3	3	3	3	3	3	4	22
38	5	5	5	4	4	23	4	3	3	3	3	3	19	5	5	5	5	5	25	4	3	4	4	3	3	3	24
39	4	3	3	3	3	16	4	2	3	4	3	3	19	3	4	4	3	4	18	4	4	3	4	4	3	4	26
40	4	4	3	4	4	19	4	2	2	2	4	4	18	3	2	4	4	3	16	4	5	4	4	4	4	4	29
41	2	2	2	3	4	13	3	3	1	1	3	3	14	5	5	4	5	4	23	4	4	4	4	4	4	4	28
42	4	4	3	5	5	21	4	3	1	2	2	4	16	3	3	4	4	4	18	4	4	4	4	5	5	4	30
43	3	3	4	4	4	18	3	2	4	4	3	3	19	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	3	27
44	4	4	3	3	4	18	2	2	2	4	3	4	17	4	3	4	4	4	19	3	3	3	3	3	3	3	21
45	5	5	4	2	3	19	3	1	2	2	3	4	15	5	5	5	5	5	25	3	2	3	3	3	4	3	21
46	5	5	3	4	4	21	1	2	1	3	3	3	13	3	3	4	4	4	18	4	4	4	3	3	3	4	25
47	2	1	4	2	5	14	2	3	3	3	2	4	17	3	2	3	4	3	15	4	5	5	5	5	4	3	31
48	4	5	3	3	5	20	4	2	4	4	2	4	20	4	3	3	5	4	19	3	3	3	3	3	3	3	21
49	5	5	3	4	4	21	3	3	3	3	3	4	19	4	3	2	3	4	16	2	3	3	3	3	4	4	22
50	3	4	3	3	3	16	4	3	3	2	2	3	17	4	3	2	4	4	17	3	3	4	4	4	4	4	25
51	3	4	4	5	4	20	4	3	3	3	4	5	22	5	5	4	4	5	23	4	4	3	4	3	4	4	26
52	4	4	4	5	5	22	4	3	4	4	4	4	23	4	4	3	5	4	20	5	4	5	5	4	5	4	32

Lampiran 5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

		Correlations							
		Q1_X	Q2_X	Q3_X	Q4_X	Q5_X	Q6_X	Q7_X	SKORE
		1	1	1	1	1	1	1	_X1
Q1_X1	Pearson Correlation	1	,751**	,477**	,452**	,444**	,378**	,373**	,716**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,001	,006	,006	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q2_X1	Pearson Correlation	,751**	1	,573**	,549**	,483**	,582**	,339*	,790**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,014	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q3_X1	Pearson Correlation	,477**	,573**	1	,719**	,479**	,630**	,538**	,824**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q4_X1	Pearson Correlation	,452**	,549**	,719**	1	,563**	,558**	,432**	,793**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,000	,000	,001	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q5_X1	Pearson Correlation	,444**	,483**	,479**	,563**	1	,511**	,391**	,717**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000		,000	,004	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q6_X1	Pearson Correlation	,378**	,582**	,630**	,558**	,511**	1	,675**	,815**
	Sig. (2-tailed)	,006	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q7_X1	Pearson Correlation	,373**	,339*	,538**	,432**	,391**	,675**	1	,710**
	Sig. (2-tailed)	,006	,014	,000	,001	,004	,000		,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
SKORE_X1	Pearson Correlation	,716**	,790**	,824**	,793**	,717**	,815**	,710**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Q1_X	Q2_X	Q3_X	Q4_X	Q5_X	Q6_X	Q7_X	SKORE
		2	2	2	2	2	2	2	_X2
Q1_X2	Pearson Correlation	1	,707**	,374**	,202	,528**	,498**	,498**	,720**
	Sig. (2-tailed)		,000	,006	,150	,000	,000	,000	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q2_X2	Pearson Correlation	,707**	1	,566**	,502**	,531**	,510**	,422**	,789**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,002	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q3_X2	Pearson Correlation	,374**	,566**	1	,701**	,458**	,425**	,358**	,714**
	Sig. (2-tailed)	,006	,000		,000	,001	,002	,009	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q4_X2	Pearson Correlation	,202	,502**	,701**	1	,486**	,498**	,460**	,706**
	Sig. (2-tailed)	,150	,000	,000		,000	,000	,001	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q5_X2	Pearson Correlation	,528**	,531**	,458**	,486**	1	,650**	,673**	,805**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000		,000	,000	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q6_X2	Pearson Correlation	,498**	,510**	,425**	,498**	,650**	1	,813**	,830**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	,000	,000		,000	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q7_X2	Pearson Correlation	,498**	,422**	,358**	,460**	,673**	,813**	1	,794**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,009	,001	,000	,000		,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
SKORE_X2	Pearson Correlation	,720**	,789**	,714**	,706**	,805**	,830**	,794**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Q1_X3	Q2_X3	Q3_X3	Q4_X3	Q5_X3	Q6_X3	SKORE_ X3
Q1_X3	Pearson Correlation	1	,704**	,116	,667**	,540**	,163	,818**
	Sig. (2-tailed)		,000	,414	,000	,000	,247	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52
Q2_X3	Pearson Correlation	,704**	1	,141	,428**	,764**	-,040	,760**
	Sig. (2-tailed)	,000		,320	,002	,000	,779	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52
Q3_X3	Pearson Correlation	,116	,141	1	-,007	,160	,129	,441**
	Sig. (2-tailed)	,414	,320		,962	,258	,363	,001
	N	52	52	52	52	52	52	52
Q4_X3	Pearson Correlation	,667**	,428**	-,007	1	,715**	-,003	,703**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,962		,000	,986	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52
Q5_X3	Pearson Correlation	,540**	,764**	,160	,715**	1	-,081	,781**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,258	,000		,568	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52
Q6_X3	Pearson Correlation	,163	-,040	,129	-,003	-,081	1	,337*
	Sig. (2-tailed)	,247	,779	,363	,986	,568		,015
	N	52	52	52	52	52	52	52
SKORE_ X3	Pearson Correlation	,818**	,760**	,441**	,703**	,781**	,337*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,015	
	N	52	52	52	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Q1_X	Q2_X	Q3_X	Q4_X	Q5_X	Q6_X	Q7_X	SKORE
		4	4	4	4	4	4	4	_X4
Q1_X4	Pearson Correlation	1	,706**	,165	,023	,086	,123	,276*	,546**
	Sig. (2-tailed)		,000	,243	,870	,542	,386	,047	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q2_X4	Pearson Correlation	,706**	1	,160	,035	,095	,132	,288*	,553**
	Sig. (2-tailed)	,000		,257	,807	,503	,350	,038	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q3_X4	Pearson Correlation	,165	,160	1	,538**	,267	,284*	,248	,570**
	Sig. (2-tailed)	,243	,257		,000	,056	,041	,077	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q4_X4	Pearson Correlation	,023	,035	,538**	1	,442**	,504**	,405**	,639**
	Sig. (2-tailed)	,870	,807	,000		,001	,000	,003	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q5_X4	Pearson Correlation	,086	,095	,267	,442**	1	,750**	,497**	,693**
	Sig. (2-tailed)	,542	,503	,056	,001		,000	,000	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q6_X4	Pearson Correlation	,123	,132	,284*	,504**	,750**	1	,697**	,767**
	Sig. (2-tailed)	,386	,350	,041	,000	,000		,000	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q7_X4	Pearson Correlation	,276*	,288*	,248	,405**	,497**	,697**	1	,752**
	Sig. (2-tailed)	,047	,038	,077	,003	,000	,000		,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
SKORE_X4	Pearson Correlation	,546**	,553**	,570**	,639**	,693**	,767**	,752**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Q1_X5	Q2_X5	Q3_X5	Q4_X5	Q5_X5	Q6_X5	SKORE_X5
Q1_X5	Pearson Correlation	1	,198	,216	,056	-,228	-,242	,360**
	Sig. (2-tailed)		,160	,125	,696	,105	,084	,009
	N	52	52	52	52	52	52	52
Q2_X5	Pearson Correlation	,198	1	-,040	,092	-,119	,104	,390**
	Sig. (2-tailed)	,160		,776	,519	,399	,461	,004
	N	52	52	52	52	52	52	52
Q3_X5	Pearson Correlation	,216	-,040	1	,352*	,046	,013	,568**
	Sig. (2-tailed)	,125	,776		,011	,744	,926	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52
Q4_X5	Pearson Correlation	,056	,092	,352*	1	,072	-,053	,575**
	Sig. (2-tailed)	,696	,519	,011		,614	,710	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52
Q5_X5	Pearson Correlation	-,228	-,119	,046	,072	1	,696**	,485**
	Sig. (2-tailed)	,105	,399	,744	,614		,000	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52
Q6_X5	Pearson Correlation	-,242	,104	,013	-,053	,696**	1	,499**
	Sig. (2-tailed)	,084	,461	,926	,710	,000		,000
	N	52	52	52	52	52	52	52
SKORE_X5	Pearson Correlation	,360**	,390**	,568**	,575**	,485**	,499**	1
	Sig. (2-tailed)	,009	,004	,000	,000	,000	,000	
	N	52	52	52	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Q1_X6	Q2_X6	Q3_X6	Q4_X6	Q5_X6	SKORE_X 6
Q1_X6	Pearson Correlation	1	,848**	,143	,174	-,076	,752**
	Sig. (2-tailed)		,000	,313	,217	,591	,000
	N	52	52	52	52	52	52
Q2_X6	Pearson Correlation	,848**	1	,068	,304*	-,033	,797**
	Sig. (2-tailed)	,000		,632	,028	,815	,000
	N	52	52	52	52	52	52
Q3_X6	Pearson Correlation	,143	,068	1	,071	,132	,457**
	Sig. (2-tailed)	,313	,632		,616	,349	,001
	N	52	52	52	52	52	52
Q4_X6	Pearson Correlation	,174	,304*	,071	1	,039	,555**
	Sig. (2-tailed)	,217	,028	,616		,783	,000
	N	52	52	52	52	52	52
Q5_X6	Pearson Correlation	-,076	-,033	,132	,039	1	,320*
	Sig. (2-tailed)	,591	,815	,349	,783		,021
	N	52	52	52	52	52	52
SKORE_X 6	Pearson Correlation	,752**	,797**	,457**	,555**	,320*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,021	
	N	52	52	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Q1_X7	Q2_X7	Q3_X7	Q4_X7	Q5_X7	Q6_X7	SKORE_X7
Q1_X7	Pearson Correlation	1	,204	,363**	,206	,061	,130	,584**
	Sig. (2-tailed)		,146	,008	,144	,665	,357	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52
Q2_X7	Pearson Correlation	,204	1	,435**	,247	,338*	-,072	,636**
	Sig. (2-tailed)	,146		,001	,078	,014	,614	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52
Q3_X7	Pearson Correlation	,363**	,435**	1	,714**	,111	-,031	,770**
	Sig. (2-tailed)	,008	,001		,000	,434	,826	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52
Q4_X7	Pearson Correlation	,206	,247	,714**	1	,225	,187	,732**
	Sig. (2-tailed)	,144	,078	,000		,109	,184	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52
Q5_X7	Pearson Correlation	,061	,338*	,111	,225	1	,112	,474**
	Sig. (2-tailed)	,665	,014	,434	,109		,428	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52
Q6_X7	Pearson Correlation	,130	-,072	-,031	,187	,112	1	,320*
	Sig. (2-tailed)	,357	,614	,826	,184	,428		,021
	N	52	52	52	52	52	52	52
SKORE_X7	Pearson Correlation	,584**	,636**	,770**	,732**	,474**	,320*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,021	
	N	52	52	52	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Q1_X8	Q2_X8	Q3_X8	Q4_X8	Q5_X8	SKORE_X 8
Q1_X8	Pearson Correlation	1	,731**	,416**	,475**	,558**	,815**
	Sig. (2-tailed)		,000	,002	,000	,000	,000
	N	52	52	52	52	52	52
Q2_X8	Pearson Correlation	,731**	1	,427**	,346*	,444**	,783**
	Sig. (2-tailed)	,000		,002	,012	,001	,000
	N	52	52	52	52	52	52
Q3_X8	Pearson Correlation	,416**	,427**	1	,628**	,628**	,774**
	Sig. (2-tailed)	,002	,002		,000	,000	,000
	N	52	52	52	52	52	52
Q4_X8	Pearson Correlation	,475**	,346*	,628**	1	,718**	,768**
	Sig. (2-tailed)	,000	,012	,000		,000	,000
	N	52	52	52	52	52	52
Q5_X8	Pearson Correlation	,558**	,444**	,628**	,718**	1	,820**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000		,000
	N	52	52	52	52	52	52
SKORE_X 8	Pearson Correlation	,815**	,783**	,774**	,768**	,820**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	52	52	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Q1_Y	Q2_Y	Q3_Y	Q4_Y	Q5_Y	Q6_Y	Q7_Y	SKORE_Y
Q1_Y	Pearson Correlation	1	,522**	,707**	,643**	,565**	,503**	,277*	,773**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,047	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q2_Y	Pearson Correlation	,522**	1	,584**	,720**	,453**	,336*	,292*	,743**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,001	,015	,036	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q3_Y	Pearson Correlation	,707**	,584**	1	,802**	,687**	,603**	,242	,855**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,083	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q4_Y	Pearson Correlation	,643**	,720**	,802**	1	,667**	,544**	,320*	,873**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,021	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q5_Y	Pearson Correlation	,565**	,453**	,687**	,667**	1	,794**	,366**	,838**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000		,000	,008	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q6_Y	Pearson Correlation	,503**	,336*	,603**	,544**	,794**	1	,375**	,765**
	Sig. (2-tailed)	,000	,015	,000	,000	,000		,006	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
Q7_Y	Pearson Correlation	,277*	,292*	,242	,320*	,366**	,375**	1	,536**
	Sig. (2-tailed)	,047	,036	,083	,021	,008	,006		,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52
SKORE_Y	Pearson Correlation	,773**	,743**	,855**	,873**	,838**	,765**	,536**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,788	,917	8

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,787	,917	8

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,751	,819	7

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,759	,843	8

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,702	,696	7

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,726	,723	6

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,738	,768	7

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,802	,908	6

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,787	,919	8

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama Lengkap : Dessy Saptarini
Alamat : Plosokuning RT 03/04 Pandeyan, Grogol,
Sukoharjo
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 6 Juni 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
No. HP : 0858 0259 6212
Email : dessy.saptarini.87@gmail.com

Pendidikan Formal

1. RA Al Mustaqim Telukan, Grogol, Sukoharjo Tahun 2003.
2. SD N Telukan 02, Telukan, Grogol, Sukoharjo Tahun 2009.
3. SMP N 03 Sukoharjo, Sukoharjo Tahun 2012
4. SMA MTA Surakarta, Pasar Kliwon, Surakarta Tahun 2015
5. IAIN Surakarta, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo Tahun 2020

Lampiran 7. Hasil Cek Plagiarisme

The screenshot displays the 'Pemeriksa plagiarisme' (Plagiarism Checker) interface in a Mozilla Firefox browser. The URL is <https://my.plagamme.com/myfiles>. The interface is divided into a left sidebar and a main content area.

Left Sidebar (Navigation Menu):

- Mengunggah (Upload)
- Tulisan (Writing)
- Pembayaran (Payment)
- Gratis (Free)
- Koreksi (Correction)
- Menghilangkan plagi...
- Pesananku (My Orders)
- NILAI KAMI (Our Rating) - 5 stars

Main Content Area (Report for 'Skripsi.docx', 3 minutes ago):

- Risiko dari plagiarisme: 18% TERTINGGI**
- Parafrase: 2%
- Kutipan salah: 0%
- Konsentrasi: ★★★

Bagikan (Share) Options:

- Dalam: \$1.00
- Artikel ilmiah: \$2.00

Actions:

- Mengoreksi >
- Hapus plagiarisme >
- Pemeriksaan tata letak >

View Report: Lihat laporan \$2.74